



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

**KOMUNIKASI APARAT DESA DALAM
MELAKUKAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN
DI DESA BANJARBENDO KECAMATAN
SIDOARJO**

Skripsi

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh:

Ahmad Alvian Ade Pratama
NIM B76216079

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2021

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : Ahmad Alvian Ade Pratama

NIM : B76216079

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul **Komunikasi Aparat Desa Dalam Melakukan Pengelolaan Pembangunan Di Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo** adalah benar merupakan karya saya sendiri, hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut diberi tanda sitasi dan ditunjuk dalam karya pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar dan ditemukan pelanggaran atas karya skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Surabaya, 05 Januari 2021

buat pernyataan



Ahmad Alvian Ade Pratama
NIM. B76216079

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Ahmad Alvian Ade Pratama
NIM : B76216079
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Komunikasi Aparat Desa Dalam Melakukan
Pengelolaan Pembangunan Di Desa
Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo
Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan

Surabaya, 5 Januari 2021
Dosen Pembimbing



Dr. Moch. Choirul Arif S.Ag. M.Fil.I

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Komunikasi Aparat Desa Dalam Melakukan Pengelolaan Pembangunan di Desa Banjarbendo
Kecamatan Sidoarjo

SKRIPSI

Disusun oleh

Ahmad Alvian Ade Pratama

B76216079

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana Strata Satu

Pada tanggal 12 Januari 2021

Tim Penguji

Penguji I



Dr. Moch. Choirul Arif, S.Ag,M.Fil.I
NIP. 197110171998031001

Penguji II



Dr. Lilik Hamidah, S.Ag.M. Si
NIP. 197312171998032002

Penguji III



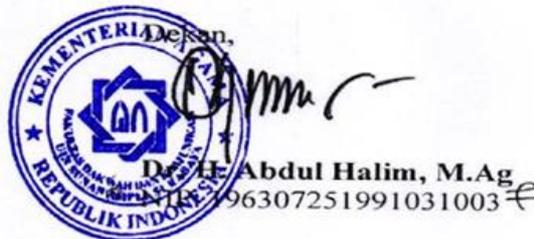
Imam Maksum, M.Ag
NIP. 197306202006041001

Penguji IV



Muchlis, S. Sos.I, M.Si
NIP. 197911242009121001

Surabaya, 18 Januari 2021



KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
REPUBLIK INDONESIA
Dr. H. Abdul Halim, M.Ag
NIP. 196307251991031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Alvian Ade Pratama
NIM : B76216079
Fakultas/Jurusan : FDK/Ilmu Komunikasi
E-mail address : ahmadalvianadepratama@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Komunikasi Aparat Desa Dalam Melakukan Pengelolaan Pembangunan Di Desa Banjarnendo

Kecamatan Sidoarjo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Februari 2021

Penulis

(
A. Alvian
nama terang dan tanda tangan
)

ABSTRAK

**Ahmad Alvian Ade Pratama, B76216079, 2021.
“Komunikasi Aparat Desa Dalam Melakukan Pengelolaan
Pembangunan di Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo.”**

Penelitian ini mengkaji tentang proses Komunikasi yang dilakukan Aparat Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lalu pengumpulan data dilaksanakan dengan Wawancara, Observasi, Dokumentasi. Untuk menganalisis data, dalam penelitian ini dipergunakan analisis data dengan pendekatan partisipatif. Artinya sebuah pendekatan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan.

Data temuan penelitian dan pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Komunikasi Partisipatif adalah pola komunikasi yang digunakan aparat desa dalam mengelola pembangunan di Desa Banjarbendo. Musrenbangdes yang melibatkan tokoh agama dan tokoh Masyarakat adalah media komunikasi yang digunakan aparat desa dalam mengelola pembangunan di Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo.

Kata Kunci : *Komunikasi Pembangunan, Partisipatif.*

ABSTRACT

**Ahmad Alvian Ade Pratama, B76216079, 2021.
"Communication of Village Officials in Managing
Development in Banjarbendo Village, Sidoarjo District."**

This study examines the communication process carried out by village officials in development management in Banjarbendo Village, Sidoarjo District.

This study used descriptive qualitative method. Then data collection is carried out by interview, observation, documentation. To analyze the data, this study used data analysis with a participatory approach. This means an approach to provide opportunities for communities to be directly involved in the decision-making process.

The data of research findings and discussion of this thesis can be concluded that Participatory Communication is a communication pattern used by village officials in managing development in Banjarbendo Village. Musrenbangdes involving religious and community leaders is a communication medium used by village officials in managing development in Banjarbendo Village, Sidoarjo District.

Keywords: Development Communication, Participatory.

مختصرة نبذة

اتصال مسؤولي القرية في " 2021. ، B76216079 أحمد أفيان أدي براتاما ،
"تنفيذ إدارة التنمية في قرية بنجار بيندو ، مقاطعة سيدوار جو

تبحث هذه الدراسة في عملية الاتصال التي قام بها مسؤولو القرية في إدارة التنمية في
، مقاطعة سيدوار جو بانجار بيندو قرية

استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي النوعي. ثم يتم جمع البيانات عن طريق المقابلة
والملاحظة والتوثيق. لتحليل البيانات ، استخدمت هذه الدراسة تحليل البيانات بمنهج
تشاركي. وهذا يعني اتباع نهج لتوفير الفرص للمجتمعات للمشاركة بشكل مباشر في
عملية صنع القرار .

يمكن استنتاج بيانات نتائج البحث ومناقشة هذه الأطروحة أن الاتصال التشاركي هو نمط
موسرنبانغديسالتني . اتصال يستخدمه مسؤولو القرية في إدارة التنمية في قرية بنجار بيندو
تشمل القادة الدينيين والمجتمعيين هي وسيلة اتصال يستخدمها مسؤولو القرية في إدارة
سيدوار جو ، مقاطعة بانجار بيندو التنمية في قرية

الكلمات المفتاحية: تنمية الاتصالات ، المشاركة

Daftar Isi

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
مختصرة نبذة.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Konsep	5
1. Proses Komunikasi	5
2. Pemerintahan Desa	7
3. Media Komunikasi	7
4. Pengelolaan pembangunan Desa	8
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN TEORETIK	
A. Komunikasi Pembangunan	13

1.	Definisi	13
a)	Komunikasi	13
b)	Pembangunan	15
c)	Komunikasi Pembangunan	16
2.	Pola Komunikasi Pembangunan.....	18
B.	Pembangunan Desa	22
1.	Definisi	22
2.	Dasar Hukum	23
3.	Tujuan Pembangunan Desa.....	25
C.	Kerangka Pikir Penelitian	27
a)	Tahap Komunikasi Pembangunan	36
D.	Perspektif Islam	38
E.	Penelitian Terdahulu	40
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Pendekatan dan Jenis penelitian.....	43
B.	Subyek,Obyek, dan Lokasi penelitian	45
C.	Jenis dan Sumber Data	47
D.	Tahap-Tahap Penelitian.....	49
E.	Teknik Pengumpulan Data	51
F.	Teknik Analisis Data	52
G.	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN		
B.	Gambaran Umum Subjek Penelitian	54
1.	Profil Data.....	54

G. Penyajian Data	67
C. Media Komunikasi Aparat desa	79
1. Musrenbang Desa	79
2. Pelibatan Tokoh Masyarakat.....	81
3. Media Massa Berbentuk Plakat.....	83
D. Pembahasan Hasil Penelitian (Analisis Data).....	84
1. Temuan Penelitian.....	86
2. Perspektif Teori.....	90
3. Perspektif Islam.....	94
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	96
B. Rekomendasi.....	96
C. Keterbatasan Penelitian	97
DAFTAR PUSTAKA	98
BIODATA PENULIS	101

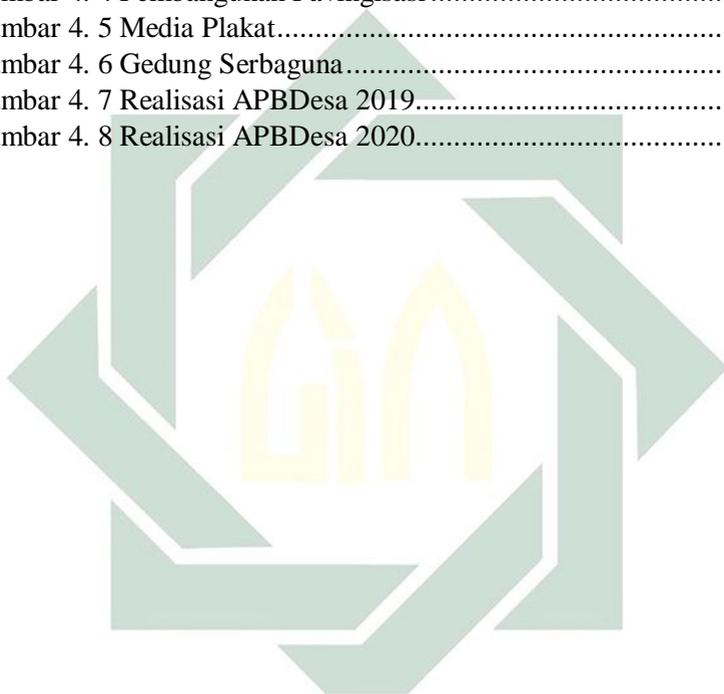
Daftar Tabel

Tabel 4.1 Data Pekerjaan Penduduk	56
Tabel 4.2 Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan	57
Tabel 4.3 Data Kepercayaan Penduduk	58
Tabel 4.4 Struktur Pemerintahan Desa Banjarnendo	64



Daftar Gambar

Gambar 4. 2 Musyawarah Desa.....	55
Gambar 4. 2 Musyawarah Desa.....	70
Gambar 4. 3 Pembangunan Saluran Air.....	72
Gambar 4. 4 Pembangunan Pavingisasi	74
Gambar 4. 5 Media Plakat.....	75
Gambar 4. 6 Gedung Serbaguna.....	76
Gambar 4. 7 Realisasi APBDesa 2019.....	77
Gambar 4. 8 Realisasi APBDesa 2020.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran komunikasi dirasakan sangat penting terutama dalam pembangunan. Penggunaan komunikasi pun disesuaikan dengan fungsi serta tujuan yang diinginkan. Tujuan komunikasi tersebut mencakup menyelesaikan hal-hal penting bagi kebutuhan hidup serta menciptakan dan memupuk hubungan dengan orang lain.

Menurut Everett M. Rogers komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka.¹ Dengan definisi ini memberikan pengertian bahwa komunikasi efektif apabila orang tersebut menafsirkan pesan yang sama seperti apa yang disampaikan oleh komunikator.²

Pembangunan pedesaan merupakan masalah yang sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan secara bersama antara pemerintah dengan masyarakat karena tidak dapat dipungkiri bahwa dibandingkan dengan pembangunan yang berlangsung di perkotaan, maka pembangunan di pedesaan masih sangat tertinggal, terutama yang terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi wewenang oleh

¹ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.1

² Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. (Bandung: Remaja Rostda Karya, 1999), h.10

pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.³

Sumber anggaran pembangunan desa selama ini sebagian besar berasal dari dana APBD, baik APBD Provinsi Kabupaten/Kota. Kini, berdasarkan UU dan PP di atas, maka desa mendapatkan sumber anggaran pembangunan baru yaitu alokasi dana dari APBN secara langsung.⁴

Kebijakan pemerintah ini memungkinkan desa menyelenggarakan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa mempunyai harapan baru untuk mandiri dengan semua potensi ekonomi, sosial, budaya dan sumber daya yang dimilikinya.

Besarnya dana pembangunan yang diberikan pada desa harus benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintahan desa harus benar-benar siap, termasuk kemampuan kepala desa. Aparatur dan warga desa perlu mempersiapkan diri menyongsong implementasi UU desa antara lain pemahaman regulasi,

³Diakses pada 1 oktober 2019 dari <http://www.keuangandes.com>

⁴ Diakses pada 1 oktober 2019 dari <http://www.keuangandes.com>

pergeseran hubungan sosial aparaturnya dan masyarakat desa, kebijakan anggaran, perencanaan pembangunan, peraturan desa, dan data dasar desa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparan.

Desa Banjarnegara merupakan salah satu desa yang mendapat bantuan alokasi dana dari APBN secara langsung. Dengan bantuan ini membuat pemerintah desa harus bisa memanfaatkan dengan baik. Pelayanan kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan harus di selesaikan dan dipusatkan. Dalam hal ini diperlukan adanya peran komunikasi yang baik antara Aparatur desa dan masyarakat desa guna mewujudkan pembangunan yang di inginkan oleh seluruh lapisan masyarakat desa Banjarnegara. Dalam Perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan melalui proses musyawarah Desa yang di fasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pelibatan semua pihak dihasilkan program kerja dan kegiatan yang dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa secara inklusif serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut.

Hal ini mendorong penulis untuk mengkaji dan meneliti masalah proses komunikasi aparat desa dalam pengelolaan pembangunan di desa Banjarnegara yang bertujuan untuk pembangunan yang melibatkan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Proses komunikasi Aparat desa dalam pengelolaan pembangunan di Desa BanjARBendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo?
2. Media apa yang digunakan Aparat desa BanjARBendo dalam mengelola pembangunan di wilayahnya?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui/Menjelaskan proses komunikasi yang terjadi antara aparat desa dan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan di desa BanjARBendo.
2. Untuk mengetahui/Menjelaskan media yang digunakan Aparat desa dalam mengelola pembangunan di desa BanjARBendo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian ini diharapkan untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam komunikasi aparatur desa guna melakukan pengelolaan pembangunan di suatu desa.
2. Secara praktis, penelitian ini di harapkan menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat desa BanjARBendo kecamatan Sidoarjo, bagaimana peran aparatur desa dalam pengelolaan pembangunan di desa BanjARBendo.

E. Definisi Konsep

1. Proses Komunikasi

Proses Komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dan komunikatornya. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif (sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya).

Proses komunikasi dapat terjadi apabila ada interaksi antarmanusia dan ada penyampaian pesan untuk mewujudkan motif komunikasi.

Tahapan Proses komunikasi adalah sebagai berikut:⁵

1. Penginterpretasian

Hal yang diinterpretasikan adalah motif komunikasi, terjadi dalam diri komunikator. Artinya, proses komunikasi tahap pertama bermula sejak motif komunikasi muncul.

2. Penyandian

Tahap ini masih ada dalam komunikator dari pesan yang bersifat abstrak berhasil diwujudkan kedalam lambing komunikasi. Tahap ini disebut dengan *encoding*.

3. Pengiriman

Proses ini terjadi ketika komunikator melakukan tindakan komunikasi, mengirim lambang komunikasi dengan peralatan jasmaniah yang disebut *transmitter*, alat pengirim pesan.

⁵ Vardiansyah, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004),h.36

4. Perjalanan
Tahapan ini terjadi antara komunikator dan komunikan, sejak pesan dikirim hingga pesan diterima oleh komunikan.
5. Penerimaan
Tahapan ini ditandai dengan diterimanya lambang komunikasi melalui peralatan jasmaniah komunikan.
6. Penyandian balik
Tahap ini terjadi pada diri komunikan sejak lambang komunikasi diterima melalui peralatan yang berfungsi sebagai *receiver* hingga akal budinya berhasil menguraikannya (*decoding*).

Komunikasi dapat dibedakan menjadi 4 Proses yaitu:

1. Proses komunikasi primer
Proses komunikasi primer adalah penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan menggunakan lambang sebagai media.
2. Proses komunikasi sekunder
Penyampaian pesan dengan menggunakan alat setelah memakai lambang sebagai media pertama.
3. Proses komunikasi linear
Penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal.
4. Proses komunikasi sirkular
Terjadinya *feedback* atau umpan balik dari komunikan ke komunikator.

2. Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang didalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat desa.

3. Media Komunikasi

Media komunikasi merupakan sebuah sarana atau alat yang dipakai sebagai penyampaian pesan dari komunikator kepada khalayak. Media sangat dominan dalam berkomunikasi ialah panca indra manusia seperti mata, telinga.⁶

Media adalah jendela yang memungkinkan semua orang dapat melihat lingkungan yang lebih jauh, untuk penafsir yang membantu memahami pengalaman, untuk landasan penyampai informasi, sebagai komunikasi interaksi yang merupakan opini audiens, sebagai penanda pemberi petunjuk atau intruksi, sebagai filter atau pembagi fokus dan pengalaman terhadap orang lain, cermin yang

⁶ Diakses pada 12 Januari 2021

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-media-komunikasi/>

merefleksikan diri kita serta penghalang yang menutupi kebenaran.

Media komunikasi juga dijelaskan untuk sebuah sarana yang dipakai untuk memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan untuk menyampaikan sebuah informasi. Media komunikasi sangat berperan penting untuk kehidupan seluruh masyarakat. Dengan sederhana, media komunikasi merupakan perantara dalam menyampaikan sebuah informasi dari komunikator kepada komunikan yang memiliki tujuan agar efisien dalam menyebarkan pesan atau informasi.

Media komunikasi dapat dibagi ke dalam dua kategori, yakni media komunikasi personal dan media komunikasi massa. Media komunikasi personal digunakan oleh dua orang atau lebih untuk saling berhubungan. Sifat dari media komunikasi ini pribadi, sehingga dampaknya tidak bisa dirasakan oleh orang banyak.

Media komunikasi yang kedua adalah media komunikasi massa. Media komunikasi ini digunakan untuk mengkomunikasikan pesan dari satu atau beberapa orang kepada khalayak ramai. Karena sifatnya yang masif, maka media komunikasi massa dapat memiliki dampak yang besar bagi banyak orang.

4. Pengelolaan Pembangunan Desa

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dikatakan

manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik, dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.

Kata “pembangunan” menegaskan tujuan, kesatuan, dan obyek. Pembangunan mempunyai tujuan melakukan perubahan dalam masyarakat agar lebih maju, lebih makmur, lebih adil.

Dalam melakukan pengelolaan pembangunan menggunakan komunikasi pembangunan. Queral dan Gomez telah merumuskan komunikasi pembangunan, dimana komunikasi dalam konteks negara-negara berkembang, terutama kegiatan komunikasi untuk mencapai perubahan sosial yang berencana. Komunikasi pembangunan ini lebih mengutamakan kegiatan mendidik dan memberi motivasi kepada masyarakat agar menjadi lebih baik. Komunikasi pembangunan ini digunakan Aparat desa banjarbendo bertujuan untuk menanamkan gagasan-gagasan sikap netral, dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.

Menurut Zulkarimein Nasution, komunikasi pembangunan dapat dilihat dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik) diantara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara pemerintah dengan

masyarakat.⁷ Dalam hal ini bukan hanya dalam proses pembangunan saja, melainkan dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan itu sendiri. Sedangkan dalam arti sempit, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan, keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan kepada masyarakat luas.⁸

Tujuan dari komunikasi pengelolaan pembangunan sendiri adalah agar masyarakat yang dituju dapat memahami menerima, serta berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan. Sedangkan Onong Uchjana Efendy merumuskan komunikasi pembangunan adalah proses penyebaran pesan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada khalayak guna mengubah sikap, pendapat, dan perilakunya guna meningkatkan kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah yang dalam keselarasnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.⁹

Jadi penegelolaan pembangunan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan aparat desa untuk merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, serta mengevaluasi pengelolaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Banjarbendo.

⁷ Zulkarimein Nasution, *Komunikasi Pembangunan; Pengenalan Teori dan Penerapannya*,...h.92

⁸ *Ibid*

⁹ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rostda Karya,1999)h.9

F. Sistematika Pembahasan

Laporan penelitian ini melalui proses yang panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan. Pada bagian ini penulis menjelaskan latar belakang penelitian, masalah yang ada pada penelitian, tujuan penelitian, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, dan definisi konsep.

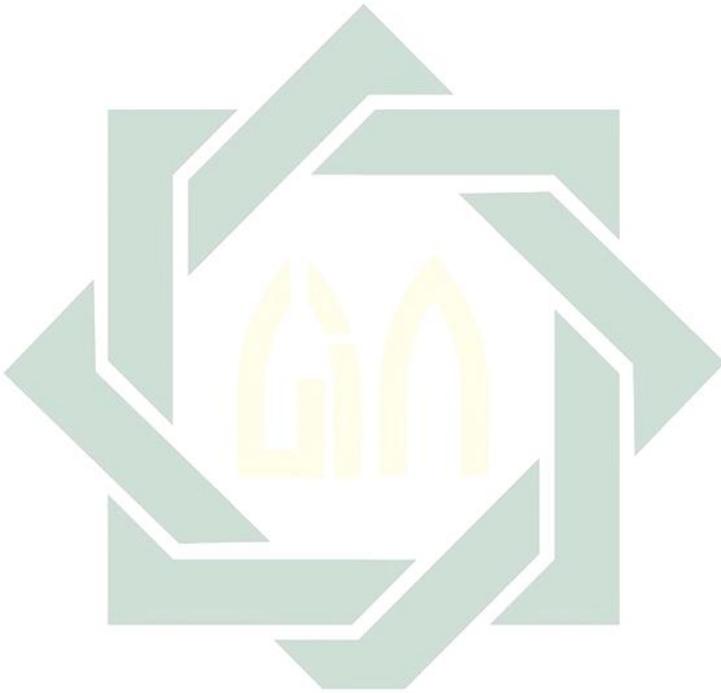
Bagian kedua merupakan kajian teoritis. Bagian ini berisi kerangka teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini, kerangka pikir penelitian dan penelitian terdahulu yang merupakan rujukan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini

Bagian ketiga berisi metode-metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, unit analisis, jenis dan sumber data, tahapam penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bagian keempat merupakan analisis data, bagian ini memaparkan gambaran umum subjek dan objek penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan penyajian data, pembahasan penelitian dan kemudian dikaitkan dengan perspektif teori dan perspektif islam.

Bagian kelima merupakan bagian penutup, bagian ini berisi simpulan yang merupakan jawaban langsung dari rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis pada bagian pertama.. Selain kesimpulan, pada bagian ini berisi rekomendasi yang merupakan anjuran bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang isu yang sama atau terkait dalam penelitian ini.

Pada bagian akhir penelitian ini berisi daftar pustaka yang digunakan penulis dan beberapa lampiran terkait dalam penelitian ini.



BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Komunikasi Pembangunan

1. Definisi

a. Komunikasi

Komunikasi secara terminologi berasal dari bahasa latin *Communico* yang artinya membagi , dan *Communis* yang artinya sama, sama disini diartikan sebagai sama makna.¹⁰ Jadi berkomunikasi berarti berusaha untuk mencapai kesamaan makna atau kesamaan arti antara kedua belah pihak yang berkomunikasi. Agar orang mempunyai kesamaan makna maka komunikasi tidak hanya bersifat informatif saja. Melainkan juga harus bersifat persuasif. Menurut Gie, Komunikasi adalah penyampaian warta yang mengandung macam-macam kepentingan dari seseorang kepada orang lain.¹¹

Sebagai suatu disiplin ilmu, definisi komunikasi hingga saat ini telah sangat banyak diutarakan oleh ilmuwan komunikasi itu sendiri. Setiap definisi memiliki perspektif yang berbeda. Seperti yang disampaikan oleh Lasswell tahun 1948, dia membuat definisi komunikasi dengan merumuskan “*Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect*”, dalam

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Rismi Somad dan Donn Juni Priansa, *Manajemen Komunikasi (Membangun Bisnis Berorientasi pelanggan)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.15

pandangan Laswell komunikasi meliputi 5 (lima) unsure, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Jadi komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu.

Terdapat banyak definisi komunikasi yang telah disampaikan oleh para pakar komunikasi, Namun seiring perkembangan zaman membuat pengertian komunikasi terus berkembang, yang dahulu mendefinisikan komunikasi sebatas dua orang atau lebih tanpa menggunakan media, kini komunikasi tidak hanya sebatas seperti itu saja, bahkan media kini menjadi salah satu alat vital guna kesuksesan komunikasi yang dilakukan. Dari pengertian diatas pula dapat dianalisis beberapa komponen yang membentuk suatu proses komunikasi. Adapun komponen tersebut antara lain:

- 1) Komunikator, merupakan pelaku yang menyampaikan atau mengirimkan pesan, baik individu maupun kelompok.
- 2) Pesan, merupakan ide, gagasan, pendapat, informasi ataupun materi yang disampaikan.
- 3) Channel, Saluran komunikasi yang digunakan. Adapula yang mengartikan nya sebagai media komunikasi.
- 4) Komunikan, pelaku yang menerima pesan. Komunikan dapat bertindak sebagai

komunikasikan individu ataupun komunikasikan kelompok.

- 5) Efek, sesuatu yang timbul karena proses komunikasi, hal ini dapat berupa tanggapan, respon, ataupun umpan balik.

Komunikasi sebagai suatu disiplin ilmu, juga dapat berhubungan dengan disiplin ilmu lainnya. Ilmu komunikasi kemudian melahirkan sub-sub baru antara lain: komunikasi politik, manajemen komunikasi, sosiologi komunikasi, psikologi komunikasi, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran, komunikasi lintas budaya, hingga komunikasi pemerintahan.

b. Pembangunan

Pembangunan sering dirumuskan sebagai suatu proses perubahan yang terencana dari situasi satu ke situasi lain yang dinilai lebih tinggi, dengan kata lain pembangunan menyangkut proses perbaikan.¹² Dalam kehidupan sehari-hari individu akan menemukan terjadi pembangunan di segala bidang, mulai infrastruktur, keilmuan dan sebagainya.

Menurut Rogers, pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial dengan kemajuan sosial dan material (termasuk

¹² Moeljarto T., *Politik pembangunan (Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi)*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1995), h.3

bertambah besarnya kebebasan, keadilan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial yang bersifat partisipatori secara luas untuk memajukan keadaan sosial dan kebendaan.¹³ Sedangkan menurut Seers, pembangunan berarti membangkitkan masyarakat di negara-negara berkembang dari keadaan kemiskinan., tingkat melek huruf (*literacy rate*) yang rendah, pengangguran, dan ketidakadilan sosial.

c. Komunikasi Pembangunan

Menurut Zulkarimein Nasution, komunikasi pembangunan dapat dilihat dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik) diantara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara pemerintah dengan masyarakat.¹⁴ Dalam hal ini bukan hanya dalam proses pembangunan saja, melainkan dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan itu sendiri. Sedangkan dalam arti sempit, komunikasi pembangunan merupakan

¹³ Zulkarimein Nasution, *Komunikasi Pembangunan; Pengenalan Teori dan Penerapannya*,... h.66

¹⁴ *ibid*

segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan, keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan kepada masyarakat luas.¹⁵

Dalam arti sempit ini kegiatan komunikasi pembangunan bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan. Sedangkan Onong Uchjana Effendy merumuskan komunikasi pembangunan adalah proses penyebaran pesan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada khalayak guna mengubah sikap, pendapat, dan perilakunya guna meningkatkan kemajuan lahiriah dan kepuasan bathiniyah yang dalam keselarasannya dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat.

Keberhasilan pembangunan berawal dari adanya komunikasi dalam pembangunan. Komunikasi memiliki peran dalam melaksanakan pembangunan. Hedebro mendefinisikan tiga aspek komunikasi dan pembangunan yang berkaitan dengan tingkat analisisnya, yaitu:

- 1) Pendekatan yang berfokus pada pembangunan suatu bangsa, dan bagaimana media massa dapat menyumbang dalam upaya tersebut. Di sini, politik dan fungsi-fungsi media massa dalam pengertian yang umum merupakan objek studi, sekaligus masalah-masalah yang menyangkut struktur

¹⁵ *Ibid*

organisasi dan pemilikan, serta kontrol terhadap media.

- 2) Pendekatan yang juga dimaksudkan untuk memahami peranan media massa dalam pembangunan nasional, namun lebih jauh spesifik. Persoalan utama dalam studi ini adalah bagaimana media dapat dipakai secara efisien, untuk mengajarkan pengetahuan tertentu bagi masyarakat suatu bangsa.
- 3) Pendekatan yang berorientasi kepada perubahan yang terjadi pada suatu komunitas lokal atau desa. Studi jenis ini mendalami bagaimana aktivitas komunikasi dapat dipakai untuk mempromosikan penerimaan yang luas akan ide-ide dan produk baru.

Dalam penelitian ini, dalam setiap perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Banjarbendo, terdapat komunikasi pembangunan yang dilakukan Aparat Desa selaku pemerintahan desa guna mengikutsertakan masyarakat menyumbangkan gagasan atau ide-ide dalam proses pembangunan dan juga menyerap aspirasi yang diberikan oleh masyarakat dalam pembangunan

2. Pola Komunikasi Pembangunan

Pola komunikasi adalah cara seseorang individu atau kelompok itu berkomunikasi. Pola komunikasi dalam hal ini adalah cara kerja suatu kelompok atau individu dalam berkomunikasi yang didasarkan pada teori-teori komunikasi

dalam menyampaikan pesan atau mempengaruhi komunikan.¹⁶

Pola komunikasi merupakan suatu sistem penyampaian pesan melalui lambang tertentu, yang mengandung arti, dan pengoperan perangsang untuk mengubah tingkah laku individu yang lain. Pola komunikasi dalam sebuah instansi, lembaga, masyarakat atau organisasi tidak terlepas dari pola komunikasi personal yang dibagi menjadi dua: pertama komunikasi intrapersonal dan komunikasi antarpersonal, serta komunikasi kelompok: pertama komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar, serta komunikasi massa dan komunikasi media.¹⁷

Dalam hal ini, Aparatur Desa lebih menggunakan pola komunikasi kelompok dalam komunikasi terhadap masyarakat. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. komunikasi kelompok terbagi menjadi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar. Komunikasi kecil adalah komunikasi yang ditujukan kognisi komunikan dan prosesnya berlangsung secara dialog. Dalam komunikasi kelompok kecil komunikator menyampaikan pesan lebih kepada pikiran

¹⁶ Andrik Purwasito, *Komunikasi Multikultural* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), h. 96

¹⁷ Onong Uchjana Efendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*(Remaja Rosdakarya,Bandung: 2009), h. 41

komunikasikan, misalnya kuliah, ceramah, seminar, dialog interaktif. Sedangkan komunikasi kelompok besar adalah komunikasi yang ditujukan afeksi komunikasi dan prosesnya berlangsung linear. Komunikasi kelompok dapat berupa diskusi panel, symposium, seminar, komunikasi dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. Dalam hal ini Aparat desa lebih menggunakan komunikasi melalui komunikasi besar yaitu dengan cara bermusyawarah dengan masyarakat yang diundang datang di balai desa.

3. Media Komunikasi Pembangunan

Media komunikasi merupakan sebuah sarana atau alat yang dipakai sebagai penyampaian pesan dari komunikator kepada khalayak. Media sangat dominan dalam berkomunikasi ialah pancaindra manusia seperti mata, telinga.

Media komunikasi juga dijelaskan untuk sebuah sarana yang dipakai untuk memproduksi, mengolah, reproduksi, serta mendistribusikan untuk menyampaikan sebuah informasi. Media komunikasi sangat berperan penting untuk kehidupan seluruh masyarakat. Dengan sederhana, media komunikasi merupakan perantara dalam menyampaikan sebuah informasi dari komunikator kepada komunikan yang memiliki tujuan agar efisien dalam menyebarkan pesan atau informasi. Komunikasi adalah perpaduan yang berlangsung dengan dasar persamaan persepsi.

Media Komunikasi memiliki beberapa manfaat dalam pembangunan:

- **Efektifitas**

Membuat mudah serta kelancaran dalam menyampaikan sebuah informasi.

- **Efisiensi**

Mempercepat penyampaian didalam sebuah informasi.

- **Konkrit**

Media komunikasi akan membantu mempercepat isi informasi atau pesan yang mempunyai sifat abstrak.

- **Motivatif**

Media komunikasi akan lebih memberikan sebuah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan.

Media komunikasi juga memiliki bentuk yaitu:

- **Media Cetak**

Beragam jenis media komunikasi yang bisa dilakukan melalui sebuah proses percetakan serta bisa dipakai sebagai sarana penyampaian informasi atau pesan. Contoh : buku, surat kabar, majalah, serta brosur.

- **Media visual atau media pandang**

Penerimaan dalam pesan yang tersampaikan melalui panca indera dan dapat dilihat . Contoh : gambar dan Foto.

B. Pembangunan Desa

1. Definisi

Desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Kata desa sendiri berasal dari bahasa Sanssekerta yakni “dhesi” yang berarti tempat lahir. Namun, perlahan artian dari desa sendiri berkembang baik yang menambah maknanya hingga mengurangi maknanya sehingga memiliki kesan negatif. Padahal, berbagai ahli berpendapat bahwa desa memiliki berbagai peranan penting.

Menurut Sutardjo Kartodikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Sedangkan menurut Sanityanti Nurmuharimah, desa merupakan wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan sendiri.

Definisi desa juga ditekankan dan juga diperkuat oleh hukum melalui Undang Undang. UU yang memberikan definisi tentang desa adalah UU No. 5 Tahun 1979 yang menjelaskan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat dan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸

Definisi desa menurut UU ditambahkan pada UU No. 22 Tahun 1999. Dalam UU tersebut, kembali dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Dapat dibandingkan antara kedua UU tersebut dimana UU no 5 memberikan batasan bahwa desa ada dibawah camat, sedangkan untuk UU No. 22 memberikan tambahan bahwa desa juga berada di bawah kewenangan kabupaten.

2. Dasar Hukum

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Adanya undang-undang tersebut agar dapat terlaksananya pemerataan pembangunan desa. Secara teoritis, setidaknya ada empat strategi pembangunan pedesaan yang dapat diterapkan, yaitu strategi

¹⁸ diakses pada 21 Mei 2020 dari <https://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli>

modernisasi pertanian, strategi anti kemiskinan, strategi pola baru pertumbuhan, dan strategi land-reform.¹⁹

Hakikat pembangunan pedesaan adalah memanusia-wikan manusia pedesaan supaya menjadi manusia yang dinamis, dewasa, mandiri, dan berani menghadapi dan mengatasi tantangan lingkungan. Kedudukan sebagai subjek penduduk pedesaan melahirkan pendekatan pembangunan pedesaan sebagai suatu totalitas.²⁰

Usaha pembangunan pedesaan perlu didekati dengan berbagai cara, seperti penggalan potensi-potensi oleh masyarakat setempat, pembinaan teknologi tepat guna yang meliputi penciptaan, pengembangan, penyebaran sampai digunakannya teknologi itu, pembinaan organisasi usaha atau unit pelaksana yang melaksanakan penerapan berbagai teknologi tepat guna untuk mencapai tujuan pembangunan, serta pembinaan kebijakan pendukung yang mencakup input, biaya, kredit, pasaran, dan lain-lain yang memberikan iklim yang serasi untuk pembangunan. (Slamet, 2003). Dalam suatu pembangunan itu sendiri, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

¹⁹ Syahyuti, *30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*. (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2006)

²⁰ Kasiyanto, *Masalah dan Strategi Pembangunan Indonesia*. (Jakarta: PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, 1991)

3. Tujuan Pembangunan Desa

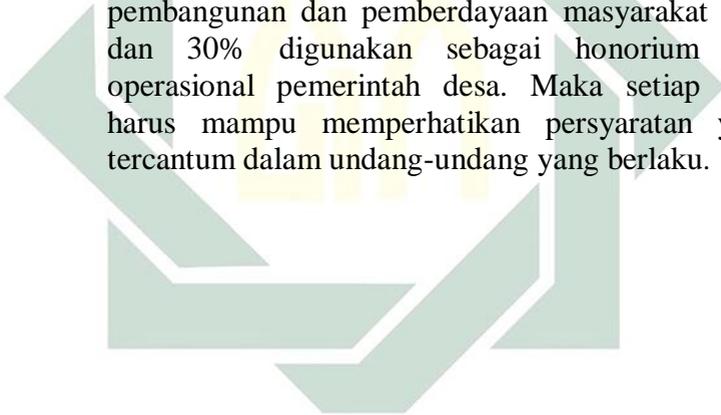
Tujuan pembangunan desa sebagaimana dituangkan UU desa adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Hakikat pembangunan pedesaan adalah memanusiawikan manusia pedesaan supaya menjadi manusia yang dinamis, dewasa, mandiri, dan berani menghadapi dan mengatasi tantangan lingkungan. Kedudukan sebagai subjek penduduk pedesaan melahirkan pendekatan pembangunan pedesaan sebagai suatu totalitas.²¹ Usaha pembangunan pedesaan perlu didekati dengan berbagai cara, seperti penggalan potensi-potensi oleh masyarakat setempat, pembinaan teknologi tepat guna yang meliputi penciptaan, pengembangan, penyebaran sampai digunakannya teknologi itu, pembinaan organisasi usaha atau unit pelaksana yang melaksanakan penerapan berbagai teknologi tepat guna untuk mencapai tujuan pembangunan, serta pembinaan kebijakan pendukung yang mencakup input, biaya, kredit, pasaran, dan lain-lain yang memberikan iklim yang serasi untuk pembangunan. Dalam suatu pembangunan itu sendiri, tujuan akhir

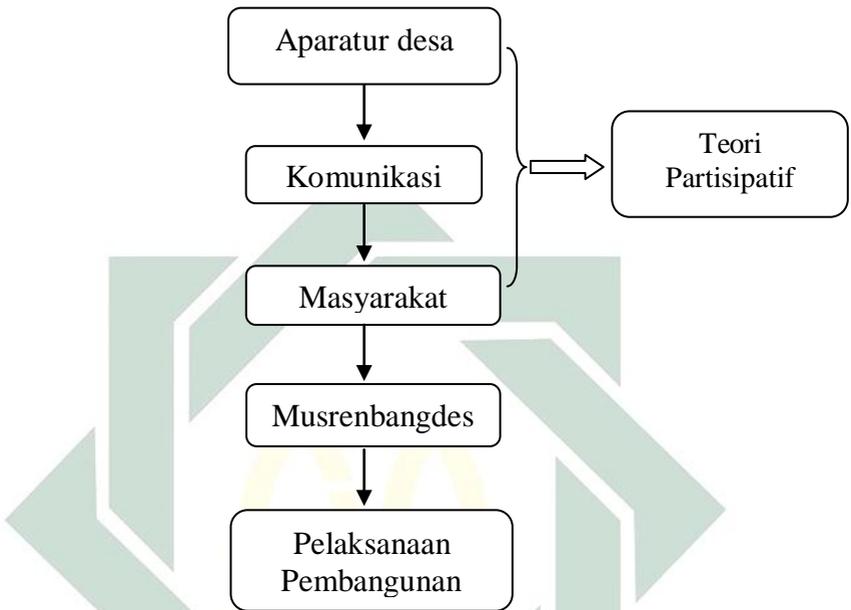
²¹ *Ibid*

yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Alokasi pembangunan dana desa harus dapat diidentifikasi sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan. Maka berdasarkan acuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat secara pembangunan top-down yaitu basis pembangunan desa yang akan merencanakan dengan analisis bottom-up keningkat pemerintah desa. Alokasi penggunaan dana desa yang berbasis otonomi tersebut adalah 70% digunakan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan 30% digunakan sebagai honorium dan operasional pemerintah desa. Maka setiap desa harus mampu memperhatikan persyaratan yang tercantum dalam undang-undang yang berlaku.



C. Kerangka Pikir Penelitian



Dalam sebuah penelitian, sangat diperlukan kerangka berpikir untuk kejelasan landasan berpikir dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teori yang paling relevan adalah teori partisipasi.

Banyak ahli memberikam pengertian mengenai konsep partisipasi. Bisa dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa inggris “participation” yang berarti pengambilan bagian pengikutsertaan.²²

²² Pius a. Partan dan M.Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. (Surabaya: Arkola, 2006), Hal.655.

Slamet mengatakan bahwa partisipasi peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik.²³

Menurut pendapat Mubyarto (1997:35) bahwa mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.²⁴

Sedangkan Menurut Canter mendefinisikan partisipasi sebagai feed-forward information and feedback information. Dengan definisi ini, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Dari pendapat Canter juga tersirat bahwa masyarakat dapat memberikan respon positif dalam artian mendukung atau memberikan masukan terhadap program atau

²³ Y. Slamet, *pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta: Sebelas Maret Univeristy Press, 1994), Hal, 7.

²⁴ Diakses pada 15 Mei 2020 dari https://www.academia.edu/23958133/teori_partisipasi_masyarakat_menurt_para_ahli

kebijakan yang diambil oleh pemerintah, namun dapat juga menolak kebijakan.²⁵

Dalam Hal ini teori Partisipatif dapat digunakan untuk Proses komunikasi aparatur desa dalam pengelolaan pembangunan desa Banjarende. Dengan begitu, komunikasi dua arah yang nantinya akan dilakukam oleh apparatur desa dan masyarakat dapat berjalan dengan lancar demi tercapainya kesejahteraan masyarakat desa.

Masyarakat dalam berpartisipasi bisa dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Robert Chambers menyebutkan 3 model partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli.²⁶ Menurut Arnstein yang mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat terdapat 8 tingkatan, berbeda dengan Kenji Greenwood yang justru membagi jenjang partisipasi dipersempit menjadi 5 tingkatan. Sedangkan Vene Klasen dengan Miller membagi jenjang partisipasi berjumlah 7 tingkatan.

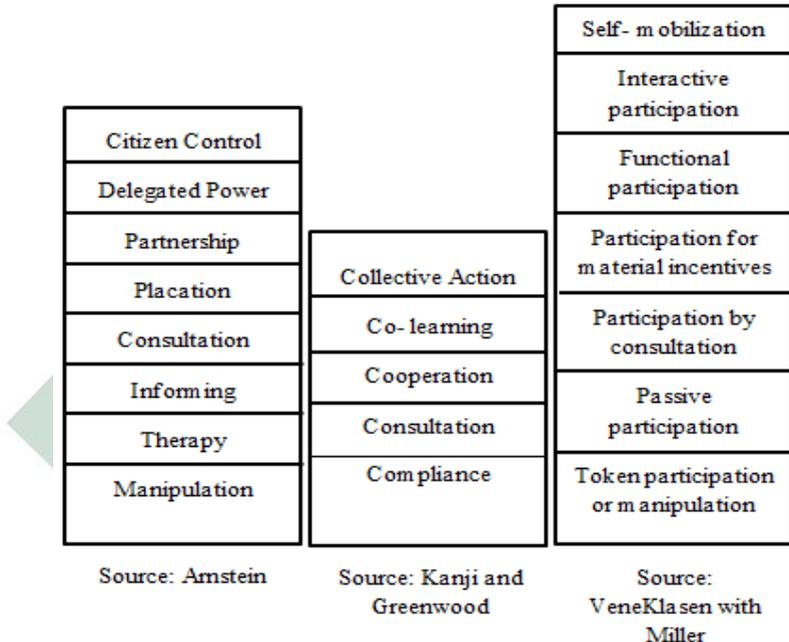
Dari beberapa pendapat para teoritis, intinya tujuan yang di inginkan dari partisipasi masyrakat yaitu munculnya kemandirian masyrakat dalam mengontrol diri. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan model partisipasi masyrakat menurut para ahli:

²⁵ Arimbi Heroeputri, Mas Achmad Santoso, "Peran Serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan" (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia-WALHI, Jakarta 1993) hal 1

²⁶ Robert Chambers, "Ideas for Development" (Earthscan, London 2005), hal.105

GAMBAR 2.1

3 Model Tingkatan Partisipasi Masyarakat Menurut Para Ahli



Dari ketiga model partisipasi masyarakat tidak ada pengakuan yang menegaskan sebagai satu-satunya jenjang yang paling benar dan paling otoritatif.²⁷ Jenjang partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa kata “partisipasi” dapat digunakan untuk aktivitas dan hubungan yang berbeda. Jenjang partisipasi masyarakat juga dapat menunjukkan bahwa masing-masing model partisipasi merupakan tentang kekuasaan.

²⁷ *Ibid*

Menurut pernyataan sherry R Arnstein yang dikutip oleh Sigit, bahwa membagi jejang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam 8 tingkat partisipasi masyarakat dengan berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat.²⁸ Tingkat partisipasi dari tertinggi ke terendah adalah sebagai berikut:

- a. *Citizen control*, masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingannya. Masyarakat mempunyai wewenang dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan.²⁹
- b. *Delegated Power*, atau bisa di sebut mendelegasikan wewenang, Pemerintahan Desa mendelegasikan kewenangannya kepada masyarakat yaitu masyarakat diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.
- c. *Partnership*, masyarakat memiliki hak berunding dengan pengambil keputusan atau pemerintah, atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu, diambil kesepakatan saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang dihadapi.³⁰

²⁸ Sigit Wijaksono, "Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pemukiman", (Jurnal ComTech Vol.4 No.1 Juni 2013), Hal.27

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid*, Hal.28

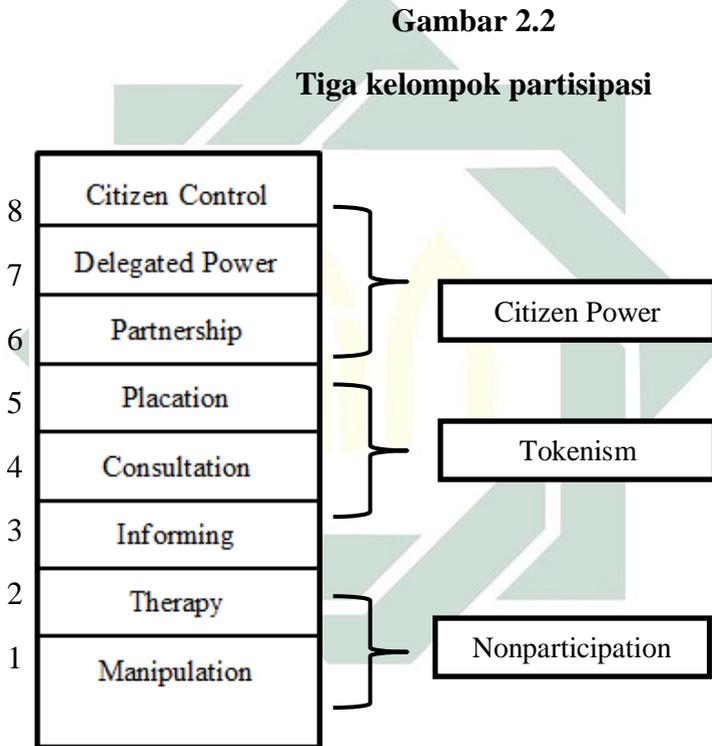
- d. *Placation*, pemegang kekuasaan (pemerintah) perlu menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, dimana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan.
- e. *Consulation*, masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode yang sering digunakan adalah survey tentang arah pikiran masyarakat atau pertemuan dengan lingkungan masyarakat.
- f. *Informing*, pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Informasi diberikan pada tahapan akhir perencanaan dan masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana yang telah disusun.³¹
- g. *Therapy*, atau bisa disebut pemulihan, Pemerintahan Desa hanya menyampaikan visi dan misinya kepada wakil masyarakat, dan masyarakat hanya mendengar saja.³²
- h. *Manipulation*, yaitu menipu, Pemerintahan Desa mendidik atau memilih sebagian dari masyarakat untuk menampung aspirasi dari masyarakat, namun

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

masyarakat namun masyarakat sama sekali tidak mengetahui hal tersebut.³³

Dengan kedelapan anak tangga diatas, Arstein mengelompokkan pada 3 kelompok besar partisipasi, seperti pada gambar dibawah ini:



Dua tangga terbawah dikategorikan sebagai “non partisipasi” dengan menempatkan bentuk-bentuk partisipasi yang dinamakan terapi dan manipulasi. Sasaran dari kedua bentuk ini adalah mendidik dan mengobati masyarakat yang berpartisipasi. Tangga

³³ *Ibid*

ketiga, keempat, dan kelima sebagai tingkat *Tekonism* yaitu tingkat partisipasi dimana masyarakat didengar dan diijinkan berpendapat, tetapi mereka tidak boleh memiliki kemampuan untuk mendapat jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan.³⁴

Selanjutnya, Arnstein mengkategorikan tiga tangga teratas kedalam tingkat kekuasaan masyarakat (*citizen power*). Masyarakat dalam dalam tingkatan ini memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dengan menjalankan kemitraan (*partnership*) dengan memiliki kemampuan tawar menawar bersama-sama pengusaha atau pada tingkat-tingkatan yang lebih atau tingkatan yang lebih tinggi pendelegasian kekuasaan (*delegated power*) dan pengawasan masyarakat (*citizen control*). Pada tingkat ke 7 dan 8, masyarakat (*non elite*) memiliki mayoritas suara dalam proses pengambilan keputusan bahkan sangat mungkin memiliki kewenangan dalam mengelola suatu objek kebijakan tertentu.³⁵

Delapan tangga partisipasi yang telah dijelaskan ini memberikan pemahaman bahwa terdapat potensi yang sangat besar untuk manipulasi program masyarakat menjadi suatu cara yang mengelabui (*devious methods*) dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Hessel mengutip pernyataan Nelson yang

³⁴ *Ibid.* Hal.29

³⁵ *Ibid.* Hal 29

menyebutkan adanya dua macam bentuk partisipasi³⁶, yaitu:

1. Partisipasi Horizontal, yaitu partisipasi diantara sesama warga atau anggota masyarakat, dimana masyarakat mempunyai kemampuan berprakarsa dalam menyelesaikan secara bersama suatu kegiatan pembangunan.
2. Partisipasi vertikal, yaitu partisipasi antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, dalam hubungan di mana masyarakat berada pada posisi sebagai pengikut.

Jadi, seseorang dikatakan berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan jika individu itu benar-benar melibatkan diri secara utuh dengan mental dan emosinya, bukan sekedar hadir dan bersikap pasif terhadap aktivitas tersebut. adapun rasa tanggung jawab sebagai salah satu unsur dari partisipasi yaitu merupakan aspek yang menentukan dalam pengambilan keputusan individu untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan. Pendapat dari Hicks juga dikutip oleh Hassel terkait merumuskan rasa tanggung jawab sebagai suatu kualitas masyarakat untuk berkembang secara mandiri, tatkala yang bersangkutan secara sadar dan bebas memilih dan menyetujui semua hal, menyerap suatu nilai, atau menerima suatu tugas.³⁷

³⁶ Hessel Nogi S Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), Hal. 323-324

³⁷ Ibid

a. Tahap-Tahap komunikasi pembangunan Partisipatif

Pelaksanaan komunikasi pembangunan partisipatif model Participatory Rural Communication Appraisal (PRCA) memfasilitasi dialog antara masyarakat dengan masyarakat, dan masyarakat dengan pemrakarsa pembangunan. Supaya semua pihak saling mengerti atas rencana pembangunan dan melaksanakan pembangunan secara kooperatif. Beberapa tahap dalam pelaksanaan komunikasi pembangunan partisipatif (Anyaeqbnam, 2004 : 12-13), yakni:

1.) Analisis Situasi dengan Participatory Rural Communication Appraisal (PRCA)

Pada fase ini, penggunaan Appraisal Communication Participatory Rural sangat dianjurkan karena itu adalah metode penelitian partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses komunikasi perencanaan program yang tepat dari awal. Dengan PRCA, kebutuhan dan masalah rakyat diidentifikasi, didefinisikan dan diprioritaskan sementara peluang dan solusi yang ada di masyarakat ditemukan.

Dengan melibatkan Participatory Rural Communication Appraisal dapat membantu mensegmentasikan kebutuhan masyarakat yang paling terpengaruh oleh masalah ini. Seperti segmen masyarakat penting yang dikenal sebagai 'Interaksi Grup'. PRCA secara khusus berusaha untuk menemukan masalah agar bisa menerima resolusi melalui aplikasi komunikasi. Masalah komunikasi seperti itu sering berhubungan dengan sosial-ekonomi dan budaya karakteristik kelompok

interaksi, termasuk persepsi mereka, nilai, pengetahuan, sikap, dan praktek terhubung ke masalah dipilih dan kebutuhan. Sebagai metode penelitian komunikasi, PRCA juga mengidentifikasi sistem komunikasi tradisional dan modern di masyarakat yang akan digunakan untuk berinteraksi dengan orang-orang selama pelaksanaan program.

2.) Desain Strategi Komunikasi

Merencanakan strategi komunikasi yang akan membantu untuk mencapai tujuan pengelolaan pembangunan. Strategi ini berdasarkan indentifikasi awal permasalahan. Pada strategi ditentukan pula kelompok prioritas interaksi dalam komunitas yang paling terpengaruh terhadap fokus masalah dan menentukan pendekatan komunikasi terbaik seperti informasi, pelatihan, motivasi, promosi, dan pendidikan.

3.) Desain Partisipasi Pesan dan Tema Diskusi

Penentuan pesan dan topic diskusi dirancang khusus yang difokuskan kepada masalah dengan dikemas menarik dan provokasi menggunakan saluran, dialog, dan media tertentu. Pesan yang diinformasikan akan ditularkan dari satu orang atau kelompok ke kelompok lain dengan maksud untuk menghasilkan efek. Tema diskusi dapat bersifat informasi, persuasi, pertahanan, dan promosi.

4.) Metode Komunikasi dan Pengembangan Bahan

Dengan bantuan media komunikasi dan produsen aktivitas pesan dan tema diskusi ini berubah menjadi seperti bahan audio visual dan

kegiatan sebagai program radio, poster, kode gambar, flipchart kemudian diproduksi massal dan distribusi akhir di lapangan.

5.) Pelaksanaan

Pada tahap ini merupakan implementasi dari kegiatan komunikasi sesuai dengan perencanaan dan temuan dilapangan.

6.) Evaluasi

Mengukur efektifitas keseluruhan program pada akhir implementasi. Mengukur sejauh mana kegiatan komunikasi tersebut memberikan dampak dan kontribusi terhadap pencapaian tujuan program komunikasi.

D. Perspektif Islam

Sebagai Makhluk individu dan sosial, manusia tidak mungkin dapat hidup seorang diri. Perbedaan pendapat, ambisi dan kepentingan masing-masing yang muncul dalam proses interaksi tersebut tidak menutup kemungkinan akan memicu lahirnya konflik, pertikaian, penindasan dan pembunuhan yang pada akhirnya terjadi kehancuran total dalam berbagai dimensi kehidupan umat manusia itu sendiri. Untuk menghindari hal tersebut, maka dibutuhkan adanya aturan dan orang yang mengaturnya atau seorang pemimpin dalam suatu gplongan tersebut.³⁸

³⁸ Haidari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yohyakarta: Gajah Mada University Press, 1993),h.8

Dalam islam kepemimpinan merupakan amanah yang dipertanggung jawab kan kepada anggota-anggota yang dipimpinya, tetapi juga dipertanggung jawab kan dihadapan Allah SWT, maka dari ini seorang pemimpin harus bersifat amanah (dapat dipercaya). Jika pemimpin tidak mempunyai sifat amanah, tentu yang terjadi adalah penyalagunaan jabatan dan wewenang untuk hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu pemerintahan desa yang didalam nya termsuk apparatur desa, sangat diharapkan agar menjadi wakil masyarakat dalam menjamin kesejahteraan dalam tata kelola desa yang diharapkan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal Ayat 27:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: “ Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rosul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”

Setiap orang harus memimpin dimulai dari dirinya sendiri, dengan berbuat amal kebajikan bagi dirinya sendiri, orang lain (masyarakat dan lingkungan sekitarnya, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa) agar mencapai tujuan hidupnya berupa keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Setiap manusia harus mengendalikan dirinya baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun sebagai makhluk allah yang memikul kewajiban

pertanggung jawaban atas segala tingkah laku dan perbuatanya selama hidup dimuka bumi.

Kajian tentang kepemimpinan memang sejak dulu menarik perhatian para ahli, sepanjang sejarah dikenal adanya kepemimpinan yang berhasil dan tidak berhasil. Selain itu kepemimpinan juga mempengaruhi cara kerja dan perilaku banyak orang. Sebagian sebabnya ada yang diketahui, sebagian belum terungkap.³⁹

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya dalam mensukseskan penelitian ini, penulis mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu. Penelitian yang dijadikan referensi dalam penelitian ini dipilih penulis karena memiliki beberapa kesamaan yang akan memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang berhasil penulis temukan adalah sebagai berikut :

1. Judul : Strategi komunikasi pembangunan dalam Community Development
 Peneliti : Nur Hasanah Afdilah
 Tahun : 2014
 Lembaga : Universitas Lampung

Penelitian ini memiliki persamaan landasan teori yaitu komunikasi pembangunan , perbedaannya penelitian ini lebih memfokuskan dalam Community

³⁹ Zakaria, "Konsep Ajaran Islam tentang kepemimpinan". (Majalah Al-adalah, No 20-21 Juli-desember, 1998), h.10

Development daripada pembangunan berbentuk fisik seperti fasilitas umum yang diperlukan masyarakat.

2. Judul : Peran Komunikasi Pemerintahan Desa Guna meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Peneliti : Romanus La Tarifu Saidin

Tahun : 2016

Lembaga : Universitas Halu Oleo

Penelitian ini memiliki persamaan dalam hal pemerintah desa sebagai Subjek dalam melakukan pengelolaan pembangunan yang ada didesa. Teori partisipasi juga digunakan dalam metode penelitiannya.

3. Judul : Peran Komunikasi Pemerintah terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bersumber Anggaran Pembiayaan Negara

Peneliti : Jose Ato Mau

Tahun : 2015

Lembaga : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya

Penelitian ini memiliki persamaan landasan hukum dimana pembangunan bersumber dari anggaran pembiayaan Negara, kemudian pemerintah menjadi subjek dalam peran komunikasi terhadap partisipasi masyarakat didalamnya.

4. Judul : Pendampingan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemuda Untuk Pembangunan Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Peneliti : Andi Awaludin

Tahun : 2015

Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Penelitian ini memiliki persamaan teori partisipasi masyarakat, namun penelitian ini lebih condong kearah pemuda dalam pengelolaan pembangunan desa.

5. Judul :Partisipsi Masyarakat pada pembangunan berkelanjutan di Desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.
Peneliti : Feni Ria Astuti
Tahun : 2017
Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Penelitian ini memiliki persamaan dimana pemerintah desa dan masyarakat bersinergi dalam pengelolaan pembangunan desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif menurut Kriyantono (2014) adalah jenis survey untuk menggambarkan populasi yang sedang diteliti dengan fokus pada perilaku yang sedang terjadi. Sedangkan kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong, 2017), dan bertujuan untuk menjelaskan fenomena-fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.

Untuk menjawab tujuan dan focus penelitian, peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan wawancara mendalam dan dibantu dengan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Aparat desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang terlibat didalamnya . Untuk menganalisis data, dalam penelitian ini dipergunakan analisis data dengan pendekatan partisipatif. Artinya sebuah pendekatan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait urusan-urusan publik, agar keputusan yang diambil memiliki dasar informasi dengan tingkat penerimaan masyarakat yang tinggi.

Penelitian kualitatif adalah suatu kegiatan terencana untuk menangkap praktik penafsiran

responden dan informan terhadap dunia. Perlu disadari bahwa setiap manusia bertindak sejalan dengan tafsirannya terhadap benda, fenomena atau masalah yang dihadapinya. Fakta dan kenyataan yang ada belumlah dapat kita percaya, melainkani berguna hanya sejauh tafsir seseorang yang menggunakannya.⁴⁰

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian pendekatan deskriptif yang mempelajari masalah-masalah yang ada dan berusaha menelaah fenomena sosial, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lexy J. Maleong bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur yang menghasilkan satu deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴¹

Alasan peneliti menggunakan deskriptif kualitatif adalah Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskripsi kualitatif yang dilakukan dengan memaparkan permasalahan pada objek penelitian yang digali secara mendalam. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah.⁴² Dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, yaitu upaya memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku baik individu maupun sekelompok orang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian

⁴⁰ Dr. Ajat Rukajat, M.MPd, "*Pendekatan Penelitian Kualitatif*", (cv budi utama, Yogyakarta 2018) hal. 64

⁴¹ Lexy. J. Maleong. *Metodologi penelitian kualitatif*. (Bandung: Rosda Karya, 2005), hal.4

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.8.

atau fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

B. Subjek, Objek, dan Lokasi Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian.

Subjek penelitian ini adalah Aparatur desa Banjarbendo Sidoarjo sebagai data atau sumber informasi oleh peneliti untuk riset yang dilakukannya. Bagian kaur keuangan dan kaur perencanaan dan pembangunan yang dianggap mampu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dengan jelas dan mendetail mengenai komunikasi aparatur desa dalam pengelolaan pembangunan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk informan, yakni dilakukan dengan mengambil orang-orang terpilih.

a. Pertimbangan pemilihan informan

Informan yang dipilih merupakan Aparatur Desa, yaitu Sekretaris Desa kepala urusan keuangan dan kepala urusan perencanaan dan pembangunan di desa Banjarbendo, yang mengerti secara mendetail mengenai tata kelola dan keuangan yang ada di desa Banjarbendo. Kemudian, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama yang terlibat langsung dalam proses pembangunan.

Informan tersebut dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Aparat desa Banjarbendo, dengan pertimbangan posisi yang dijabat di keuangan dan tata kelola desa. Informan ini mengerti bagaimana perencanaan dan keuangan yang akan digunakan dan disalurkan untuk program pembangunan yang ada di desa Banjarbendo secara mendalam.
2. Aparat desa yang memiliki waktu dan kesempatan untuk diwawancarai.
3. Aparat desa yang masih aktif menjabat dan terlibat langsung dalam realisasi APBDesa.
4. Tokoh Masyarakat yang dianggap memiliki peran penting dalam lingkungan masyarakat
5. Tokoh Agama yang memiliki peran dalam lingkup masyarakat yang kedudukannya di hormati oleh masyarakat desa.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus penelitian dengan mengaitkan teori-teori sebagai acuannya. Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah Komunikasi pemerintahan dan pembangunan, khususnya dalam bidang komunikasi aparat desa dalam pengelolaan pembangunan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di desa Banjarbendo kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Banjarbendo merupakan kawasan pedesaan yang bisa dikatakan cukup luas dengan kondisi geografis yang berada dalam perkotaan dengan luas wilayah

132.000Ha, yang terdiri dari 3 dusun yaitu desun Banjarbendo, dusun Dukuh Banjarbendo, dan Banjarpoh.

Peneliti memilih Banjarbendo sebagai lokasi penelitian karena Desa ini memiliki kelebihan dibandingkan dari desa lain dalam hal pembangunan dan juga kondisi lingkungannya. Meskipun masih termasuk dalam wilayah perkotaan, Banjarbendo memiliki Sumber Daya Alam berupa persawahan yang masih aktif dikelola oleh warga setempat. Wilayah desa juga dikatakan sangat strategis karena sangat dekat dengan akses wilayah perkotaan. Dikatakan strategis karena sangat dengan pintu gerbang tol utama perkotaan, tidak jauh dari kantor pemerintahan kabupaten, serta dekat dengan pasar swalayan / mall.

Fasilitas pembangunan di desa ini juga memiliki keunggulan dari desa lain. seperti memiliki paud, TK, Sekolah dasar, memiliki Bank Sampah, memiliki Gedung serba guna (GOR), dan masih banyak lagi.

Hal ini yang membuat peneliti melakukan riset di lokasi Desa Banjarbendo ini untuk mengetahui bagaimana proses peneglolaan pembangunan desa Banjarbendo sehingga bisa menjadi seperti kondisi yang sekarang.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Di dalam metode penelitian deskriptif kualitatif, jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, bisa ditambah dengan data tambahan yang lain. Data Penelitian merupakan faktor yang sangat mempengaruhi teknik atau jenis penelitian yang

akan digunakan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data ini berbentuk kata, penjelasan, pendapat, dan gambar.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian.

Data ini merupakan data yang diambil dari informan yang sangat dipercaya dalam kegiatan komunikasi aparat desa dalam pengelolaan pembangunan di desa Banjarbendo. Dalam hal ini peneliti mengambil lima informan yaitu sekretaris desa, bagian kaur keuangan dan kaur perencanaan dan pembangunan, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama.

Manfaat utama dari data primer adalah bahwa unsur-unsur kebongkaran tertutup terhadap sumber fenomena. Oleh karena, data primer lebih mencerminkan kebenaran yang dilihat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Manfaat data sekunder yaitu mengklasifikasikan permasalahan, meminimalkan biaya dan waktu, dan menjadi tolak ukur untuk evaluasi data primer.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan bagian sekretaris desa, kaur keuangan dan kaur perencanaan dan pembangunan. Penentuan sumber data primer menggunakan metode *purposive sampling*, yakni dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih. Sampling yang *purposive* adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Peneliti mengambil sumber data sekunder dengan mewawancarai BPD dan LPMD selaku Pengawas sistem pemerintahan desa.

D. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa tahap yang harus dilalui. Adapun tahap itu adalah sebagai berikut:⁴³

a. Tahap Pra-lapangan

- 1.) Memilih obyek yang akan diteliti serta lokasinya. peneliti mempertimbangkan segala kendala yang akan terjadi saat akan melakukan penelitian. Peneliti akhirnya memutuskan desa Banjarbendo Sidoarjo untuk diteliti setelah segala pertimbangan dipikirkan dengan benar.

⁴³ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,..., h.127-133

2.) Memilih informan yang mampu memberikan jawaban dengan baik saat wawancara berlangsung. Hal ini dilakukan agar membantu mempermudah peneliti untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria yang sudah peneliti buat.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Dalam tahap ini peneliti mulai melakukan penelitian dilapangan. Awal mula adalah memahami latar penelitian agar peneliti memahami betul apa yang akan diteliti dan melihat ke lapangan keadaan ataupun situasi pemerintahan desa Banjarbendo Sidoarjo. Setelah itu, peneliti mulai melakukan wawancara dengan pihak pemerintah desa yang berwenang dalam hal pengelolaan pembangunan di Desa Banjarbendo.

c. Tahap Analisis Data

Analisis data kualitatif (Bogdan dan Biklen, 1982) dalam buku metode penelitian kualitatif, Lexy J. Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁴

Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan semua data-data yang sudah terkumpul yang berupa

⁴⁴ Lexy. J. Maleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 248

hasil wawancara, maupun dokumentasi foto serta catatan-catatan segala kegiatan yang peneliti lihat sendiri. Kemudian disusun, dikaji, serta ditarik kesimpulan, dan dianalisa dengan analisis induktif.

d. Tahap Penulisan Laporan

Setelah semua penelitian lapangan selesai, peneliti mulai menulis laporan dari data-data yang sudah diperoleh saat melakukan penelitian di lapangan. Kemudian laporan dianalisa oleh peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan melalui.⁴⁵

a. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan agar data yang didapat oleh peneliti adalah memang benar data-data yang kriterianya sesuai dengan yang telah ditentukan oleh peneliti. Wawancara dilakukan secara bertatap muka secara langsung. Wawancara juga akan dilakukan berulang kali dan lebih intensif.

b. Pengamatan

Pengamatan dilakukan sendiri oleh peneliti dengan mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan komunikasi literasi yang dilakukan oleh aparatur desa dengan masyarakat. Pengamatan juga bisa menambahkan data-data penelitian.

⁴⁵ Deddy Mulyana. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h.180

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data penunjang penelitian. Dalam teknik yang terakhir ini peneliti melakukannya dengan cara mencari dan mendokumentasikan segala informasi yang dapat mendukung fokus penelitian. Dapat berupa gambar-gambar, foto-foto, dan dokumen-dokumen tertulis.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan menyusun data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan data lainnya secara sistematis agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif selalu bersifat induktif, alur kegiatan analisis terjadi secara bersamaan dengan:⁴⁶

1. Reduksi Data

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok dan fokus pada hal-hal yang penting untuk dikategorikan sehingga mempermudah penulis dalam menyimpulkan data secara jelas.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan cara menyusun data-data yang telah diperoleh ke dalam pola hubungan, sehingga data semakin mudah dimengerti.

⁴⁶ *Ibid.* h.150-151

3. Verifikasi Data

Langkah terakhir dalam proses analisa data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi terhadap data-data yang sudah diperoleh. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mempertanyakan kembali dengan meninjau secara sepintas untuk memperoleh pemahaman yang lebih cepat.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Setelah proses analisa telah selesai dilakukan, peneliti melakukan pengabsahan data yang berguna sebagai koreksi dari apa yang telah diperoleh, adapun teknik pemeriksaannya sebagai berikut :

a. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan ini dilakukan apabila peneliti memerlukan perpanjangan waktu untuk interview dalam melakukan observasi secara mendalam. Hal ini dilakukan apabila data yang diperoleh dirasa kurang memuaskan dan perlu tambahan waktu untuk mengumpulkan data yang dirasa kurang tersebut.

b. Kecukupan referensial

Artinya adalah penggunaan bahan-bahan yang terekam dan tercatat yang nantinya digunakan sebagai pegangan untuk menganalisis data dan menafsirkan data. Peneliti akan merekam proses wawancara dan juga mencari referensi pendukung untuk penelitian yang dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subyek Penelitian

Banjarbendo merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Sidoarjo, kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Secara administratif, Banjarbendo merupakan kawasan pedesaan yang bisa dikatakan cukup luas dengan kondisi geografis yang berada dalam perkotaan dengan luas wilayah 132.000Ha, yang terdiri dari 3 dusun yaitu desun Banjarbendo, dusun Dukuh Banjarbendo, dan Banjarpoh. Tidak hanya 3 dusun saja, desa Banjarbendo juga terdapat 3 perumahan yaitu pondok mutiara, Mutiara Regency dan juga Taman Pinang Indah yang masuk kedalam kelurahan desa Banajrbendo. Jumlah penduduk yang tercatat sementara dalam buku profil desa Banjarbendo tahun 2020 adalah \pm 8934 jiwa yang terdiri dari 4.207 penduduk laki-laki dan 4727 penduduk perempuan.⁴⁷

Desa Banjarbendo memiliki sawah seluas 12,000 Ha, tanah kering 97,435 Ha, tanah fasilitas umum 22,065, panjang saluran irigasi 2000 m dengan total luas tanah 131,500Ha. Desa Banjarbendo berbatasan sebelah utara dengan Desa Jati kecamatan Sidoarjo, sebelah selatan dengan desa Sepande kecamatan Candi, sebelah timur dengan

⁴⁷ Profil Desa Banjarbendo

Kelurahan Lemahputro kecamatan Sidoarjo, sebelah barat dengan Desa Suko Kecamatan Sidoarjo.

Letak wilayah desa Banjarbendo bisa dikatakan strategis, jarak dari pusat pemerintahan kecamatan ± 3 Km. jarak dari pusat pemerintahan kabupaten ± 5 KM. Alasan bisa dikatakan strategis salah satunya karena akses menuju perkotaan di Sidoarjo sangatlah dekat mudah. Dimana akses menuju jalan Tol ± 2 KM, kemudian juga dekat dengan pusat perbelanjaan seperti MALL, Pasar Swalayan, dan juga pasar Tradisional.⁴⁸

Gambar 4.1 Balai Desa Banjarbendo



Secara keseluruhan, Desa Banjarbendo terdapat 18 RW dan 36 RT dengan jumlah penduduk Desa Banjarbendo pada tahun 2020 berjumlah 8.934 jiwa penduduk dengan 4.207 laki-laki dan 4.727 jumlah penduduk perempuan. Desa Banjarbendo termasuk desa yang cukup maju dengan ketersediannya jumlah mushola /langgar sebanyak enambelas (16), masjid

⁴⁸ *Ibid.*

sebanyak lima (5), lapangan tenis sejumlah satu (1), posyandu sejumlah empat (4), apotek sejumlah dua (2), dokter praktek sejumlah dua (2), dokter gigi sejumlah enam (6), taman baca sejumlah satu (1), gedung TK sejumlah dua (2), SD sejumlah dua (2), play group sejumlah dua (2).

Ditinjau dari segi perekonomian, Masyarakat desa Banjarnendo terdiri dari beragam profesi, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polri/TNI, Karyawan Swasta, Wiraswasta, Petani, Tukang/Kuli bangunan, buruh pabrik, dan lain sebagainya. Disamping itu ada beberapa ibu rumah tangga yang bekerja sampingan hingga membuka usaha toko kecil-kecilan dirumahnya. Berikut merupakan profesi masyarakat desa Banjarnendo disajikan dalam tabel berikut ini:⁴⁹

Tabel 4.1 Data Penduduk Desa Banjarnendo

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	13 Orang
2.	Buruh Pabrik	1894 Orang
3.	Pegawai Swasta	1788 Orang
4.	Wiraswasta	350 Orang
5.	Pedagang	325 Orang
6.	PNS	147 orang

⁴⁹ Profil desa Banjarnendo

7.	TNI	74 orang
8.	POLRI	34 orang
9.	Dokter (Swasta/honoror)	29 orang
10.	Pekerjaan lain	3352 orang

Dari tabel diatas bisa disimpulkan masyarakat desa Banjarnendo mayoritas bekerja sebagai buruh pabrik dan juga karyawan swasta. Meskipun memiliki luas lahan pertanian yang luas didalamnya, pemilik lahan pertanian sebagian besar memilih untuk mempekerjakan orang untuk mengelola Sawah yang dimilikinya. Oleh sebab itu, hanya beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai petani.

Ditinjau dari segi pendidikan, data pendidikan desa Banjarnendo disajikan dalam tabel:⁵⁰

Tabel 4.2 Jumlah penduduk menurut tingkatan pendidikan di Desa Banjarnendo

No.	Tingkatan Pendidikan	Jumlah
1.	TK	156 orang
2.	Sekolah Dasar/MI	1374 orang
3.	SMP/SLTP/Mts	1650 orang
4.	SMA/SLTA	3.794 orang

⁵⁰ Profil desa Banjarnendo

5.	Akademi/D1-D3	272 orang
6.	Sarjana (S1-S3)	1688 orang

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Banjarnendo mayoritas jenjang pendidikannya pada tahap SMA/SLTA dengan jumlah 2.794 orang. Namun juga banyak yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi yakni 1688 orang. Tidak heran data perguruan tinggi di desa Banjarnendo begitu besar karena masyarakat nya sudah memiliki wawasan yang luas akan sadar pentingnya pendidikan, jadi semaksimal mungkin remaja yang lulus SMA akan di kuliahkan oleh orang tua nya. tak hanya itu, angka tersebut juga ditunjang dari penduduk perumahan yang masuk dalam wilayah desa Banjarnendo.

Kemudian ditinjau dari segi keagamaan, Masyarakat desa Banjarnendo mayoritas merupakan beragama Islam. Dengan penduduk berjumlah 8934 jiwa, masyarakat yang beragama islam yaitu 6.979 orang, masyarakat yang beragama Kristen 1.142 orang. Masyarakat yang beragama Katholik 581 orang, masyarakat yang beragama Hindu 73 orang, masyarakat yang beragama Budha 149 orang, dan kongguchu 10 orang.

Tabel 4.3 Data Kepercayaan Penduduk Desa Banjarnendo

No.	Agama	Jumlah
-----	-------	--------

1.	Islam	6.979 jiwa
2.	Kristen	1.142 jiwa
3.	Katholik	581 jiwa
4.	Hindu	73 jiwa
5.	Budha	149 jiwa
6.	Kongguchu	10 jiwa
	Total	8.934 jiwa

Dalam pengorganisasian masyarakat, desa Banjarbendo memiliki beberapa organisasi yang masih aktif dan berjalan dengan baik sampai saat ini. Seperti, posyandu balita dan lansia, karang taruna, PKK, pelatihan hidropnik, dan lainnya.

Terjalinya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat sangat membantu kegiatan dalam suatu organisasi didalamnya. Hal ini membuat hampir seluruh kegiatan organisasi yang ada di desa Banjarbendo masih berjalan aktif. Masyarakat ikut berperan didalam pengelolaanya. Orgninası yang sangat terlihat berperan di desa Banjarbendo yaitu karang taruna desa. Dimana semua kalangan remaja dari 3 dusun yang ada wilayah desa bisa berkumpul menjadi satu organisasi. Karena desa Banjarbendo memiliki 3 dusun didalamnya, sehingga membentuk organisasi karang taruna yang mencangkup pemuda yang terdapat dari 3 dusun menjadi satu sangat lah luar biasa.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah aparat Desa Banjarnegara. Aparat desa yang dimaksudkan disini adalah sekelompok orang yang menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dalam satu desa. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yaitu dikepalai oleh seorang kepala desa, termasuk dusun dalam artian daerah pedalaman sebagai lawan kota atau ia hidup tenteram di kaki gunung.⁵¹

Dalam sebuah desa dibutuhkan pemerintahan untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa. Struktur Pemerintahan Desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki porsinya sendiri. Pemerintah desa ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat pedesaan setempat berdasarkan dengan undang-undang yang ada demi mewujudkan pembangunan pemerintah diwilayah desa.

Setiap desa dikepalai oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh jajaran perangkat desa lainnya dalam mengurus setiap keperluan desa. Setiap jajaran memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Berikut Struktur Pemerintahan Desa yang ada beserta tugas dan fungsinya:⁵²

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI online), diakses pada tanggal 28 Mei 2020 dari <https://kbbi.web.id/desa>

⁵² 5 Struktur Pemerintahan Desa Beserta Tugas dan Fungsinya, diakses pada tanggal 28 Mei 2020 dari <http://www.berdesa.com/5-struktur-pemerintahan-desa-beserta-tugas-dan-fungsinya/>

1. Kepala Desa

Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 kepala desa adalah pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan desa.⁵³

2. Badan Pemerintahan Desa (BPD)

Badan pemerintahan desa adalah lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis berdasarkan kewilayahan. Fungsi dari BPD adalah membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa.⁵⁴

3. Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah perangkat yang membantu kepala desa menjalankan tugasnya. Fungsi sekretaris meliputi menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu persiapan penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggara pemerintah desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.⁵⁵

4. Pelaksana Teknis Desa

a. Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM)

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam mengelola administrasi dan perumusan bahan kebijakan desa. Berfungsi melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kependudukan, pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

b. Kepala Urusan Pembangunan (Kaur Pembangunan)

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam menyiapkan teknis pengembangan ekonomi desa serta mengelola administrasi pembangunan dan layanan masyarakat. Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan, menyiapkan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat serta mengelola tugas pembantuan.

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Bertugas membantu kepala desa mempersiapkan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan dan melaksanakan program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan. Berfungsi melaksanakan hasil persiapan program keagamaan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

d. Kepala Urusan Keuangan (Kaur KEU)

Berfungsi untuk membantu sekretaris desa mengelola sumber pendapatan, administrasi keuangan, penyusunan APB desa dan laporan keuangan desa. Serta melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris.

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Fungsinya untuk membantu sekretaris dalam mengelola arsip desa, inventaris kekayaan desa, dan administrasi umum. Dan juga sebagai penyedia, pemelihara dan perbaikan peralatan kantor. Serta

pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

5. Pelaksana Kewilayahan

a. Kepala Dusun

Kepala dusun atau kadus bertugas untuk membantu kepala desa melaksanakan tugasnya di wilayah dusun. Berfungsi membantu kinerja dan melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa di kawasan dusun dalam mensejahterakan masyarakat.

b. Administrasi Desa

Administrasi desa adalah kegiatan pencatatan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah desa pada buku administrasi desa. Jenis dan bentuknya menurut peraturan menteri dalam negeri ada 5 yaitu :

- Administrasi Umum. Berisi pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan desa.
- Administrasi Penduduk. Berisi pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk.
- Administrasi Keuangan. Berisi pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa.
- Administrasi Pembangunan. Berisi pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan.
- Administrasi Badan Permusyawaratan Desa. Berisi pencatatan data dan informasi berkaitan dengan BPD.

Struktur Pemerintahan Desa yang telah dibentuk, ditugaskan dan difungsikan sesuai dengan undang-undang yang telah diatur untuk desa. Setiap perangkat desa diharapkan melakukan fungsinya dengan baik. Bisa menata masyarakat dan membangun desa sesuai dengan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah pusat.⁵⁶

TABEL 4.4 Struktur Pemerintahan Desa Banjarnendo

No	Nama	Jabatan
1.	Anas Sholeh	Pj. Kepala Desa
2.	Drs. Kusnadi	Sekretaris Desa
3.	Khoirul Hayat	Kaur Perencanaan
4.	Wiwini Andayani	Kaur Keuangan
5.	Yuli Firman Muntacho, Spd.	Kaur Urusan Umum
6.	Siddha Tantri, SE	Kasi Pemerintahan
7.	Khoirul Yahya	Kasi Kesejahteraan
8.	Hari Putra Wibowo	Kasi Pelayanan
9.	M. Ilyas	Kepala Dusun Dukuh
10.	Kasan Bisri	Kepala Dusun Banjarnendo
11.	Revita Gita P.	Kepala Dusun Banjarnepoh
12.	H. Wannur	Ketua BPD
13.	Drs. Sudiono	Ketua LPMD

⁵⁶ 5 Struktur Pemerintahan Desa Beserta Tugas dan Fungsinya, diakses pada tanggal 28 Mei 2020 dari <http://www.berdesa.com/5-struktur-pemerintahan-desa-beserta-tugas-dan-fungsinya/>

1. Profil Informan

Dalam penelitian ini, penulis memilih informan yang dijadikan untuk sumber informasi guna melengkapi data penulis. Informan tersebut adalah sekretaris desa Banjarbendo, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan perencanaan dan pembangunan. Informan tidak mengambil data dari kepala desa dikarenakan masa tugas kepala desa sudah selesai sehingga yang bertindak sebagai kepala desa saat penelitian ini dilakukan adalah pejabat (pj) kepala desa yang diatur oleh pemerintah kabupaten. Untuk itu peneliti mengambil data dari sekretaris desa.

- 1.) Nama : Drs. Kusnadi
 TTL : Sidoarjo, 15 Agustus 1967
 Jabatan : Sekretaris Desa Banjarbendo

Penulis memilih Drs. Kusnadi sebagai informan karena beliau merupakan orang yang penting dalam menjalin hubungan dengan kepala desa dan terutama menjalankan komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.

- 2.) Nama : Wiwin Andayani
 TTL : Sidoarjo, 2 April 1978
 Jabatan : Kepala Urusan Keuangan

Peneliti memilih ibu Wiwin Andayani sebagai informan karena beliau merupakan orang yang bersangkutan langsung dan bertanggung jawab dengan keuangan desa Banjarbendo.

- 3.) Nama : Khoirul Hayat
 TTL : Sidoarjo, 15 Februari 1966
 Jabatan : Kepala Urusan perencanaan & pembangunan.

Peneliti memilih bapak khoirul Hayat sebagai informan karena beliau merupakan orang yang penting dalam urusan tata kelola desa lebih tepatnya dalam urusan pembangunan desa. Beliau juga berperan dalam komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam hal pembangunan dan perencanaan desa.

- 4.) Nama : Peru Sinambang P.
 TTL : Sidoarjo, 2 Oktober 1969
 Jabatan : Tokoh Masyarakat sebagai ketua RT

Peneliti memilih Bapak Peru Sinambang Putra karena beliau merupakan salah satu ketua RT yang ada di Dusun Banjarbendo. Dengan jabatan beliau sebagai Ketua RT bisa menjembatani komunikasi masyarakat dengan aparat desa.

- 5.) Nama : Mujiono
 TTL : Sidoarjo, 1 juli 1955
 Jabatan : Tokoh Masyarakat dalam bidang keagamaan.

Peneliti memilih Bapak Mujiono sebagai informan karena beliau merupakan orang yang paling di segani dalam lingkungan masyarakat setempat.

B. Proses Komunikasi Aparat Desa dalam pengelolaan pembangunan di Desa Banjarnendo

1. Tahap Sosialisasi Program Pembangunan

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Dengan pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan instrumen baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal tahun 2014 yang menekankan fokus pembangunan Indonesia harus dimulai dari unit terkecil pemerintahan, yaitu desa. Penerbitan UU tersebut kemudian diikuti dengan PP No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Terlihat bahwa sumber anggaran pembangunan desa selama ini sebagian besar berasal dari dana APBD, baik APBD Provinsi Kabupaten/Kota. Kini, berdasarkan UU dan PP di atas, maka desa mendapatkan sumber

anggaran pembangunan baru yaitu alokasi dana dari APBN secara langsung.

Pihak pemerintah desa Banjarnego sendiri melalui sekretaris desa mengatakan “Dulu sebelum ada dana desa dari APBN, itu ya tetap ada APBDes, kemudian dari program pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk pemberdayaan dan pembangunan secara intensif diseluruh desa yang ada di Indonesia. Dengan tambahan anggaran yang disalurkan dan dipropaganda media, setiap desa menerima dan minimal 1 milyar. Dan itu tidak benar, karena yang menerima dana 1 milyar keatas dikategorikan khusus untuk desa yang tertinggal atau sangat kurang dalam fasilitas yang ada. Besaran nilai yang diberikan oleh pemerintah itu pertama dilihat dari kondisi desa, terus kemudian jumlah penduduk.”⁵⁷

Wilayah desa Banjarnego sendiri bisa dikatakan termasuk dalam wilayah kota. Dimana akses desa dengan aktivitas ke kota sangatlah dekat, seperti dekat dengan mall, gerbang pintu tol, dan pemerintahan kabupaten. Namun, tetap saja Banjarnego masih dikatakan dalam wilayah desa.

Bapak drs. Kusnadi menambahkan “seperti desa Banjarnego belum pernah mendapat dana bantuan 1 Milyar, karena kondisi setiap desa itu berbeda. Itu yang ditekanakan oleh pemerintah. Desa Banjarnego awal mendapat bantuan program pemerintah untuk

⁵⁷ Hasil wawancara dengan informan Bapak Drs. Kusnadi pada tanggal 9 Juli 2020.

desa pertama kali itu mendapat dana sebesar 700 juta sekian. Setelah itu desa menerima informasi, dan pemerintah desa diharuskan mengikuti bimtek yang dianjurkan pemerintah kabupaten dari pemerintah pusat. Tujuannya agar mengerti tentang pemanfaatan bantuan dana, kedua tentang pencairan karena pencairannya melalui tahapan. Misalnya pencairannya dibagi 3 kali seperti 40%-30%-30%. Jadi tidak langsung dicairkan semuanya.”tutur pak sekdes.⁵⁸

Hal ini yang nantinya akan dikelola dari pihak desa melalui rancangan yang dibuat seperti prioritas mana yang didahulukan dengan mendapat anggaran bantuan dari pemerintah. Sesuai dengan program pemerintah yang mengedepankan untuk pembangunan dan perencanaan desa, untuk itu pihak desa segera membuat laporan pertanggung jawaban rencana apa yang akan digunakan untuk menggunakan dana bantuan pemerintah tersebut. karena itu merupakan syarat yang harus dilaporkan kepada inspektorat untuk pencairan dana tahap pertama.

Namun, dalam melakukan perencanaan dan pembangunan. Aparatur desa tidak bisa mengambil keputusan sendiri, karena butuh partisipasi masyarakat dalam komunikasi tentang pembangunan dan pemberdayaan apa saja di masing masing wilayah dusun. Untuk itu, Aparatur desa dalam merancang susunan dalam pembangunan membutuhkan partisipasi dari

⁵⁸ Hasil wawancara dengan informan Bapak Drs. Kusnadi pada tanggal 9 Juli 2020.

masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan dengan cara mengundang beberapa tokoh masyarakat seperti pak RT/RW, tokoh masyarakat, BPD dan LPMD.

2. Tahap Musyawarah Desa

Gambar 4.2 Musyawarah pihak pemerintah desa dengan Masyarakat membahas pembangunan desa



Langkah aparat desa dalam komunikasi dengan masyarakat terbilang sangat aktif. Untuk itu sangat membantu masyarakat dalam mengetahui perkembangan dan pengelolaan desa secara transparan. Hal ini yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa cukup sangat tinggi dan berharap apapun yang dikeluhkan masyarakat dapat ditampung dan dapat direalisasikan oleh pihak pemerintah desa.

Dalam musyawarah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan masyarakat yang di adakan di Balai desa yang membahas mengenai pembangunan desa, informan menambahkan dalam pertemuan tersebut pihak pemerintah desa

menekankan “untuk program pembangunan, orang orang kalau ada uang, cenderung tidak untuk pemberdayaan pola pikirnya. Selalu cenderung harus dihabiskan dalam pembangunan, sedangkan dana yang dialokasikan tidak semuanya harus digunakan untuk pembangunan. seperti saluran air, peninggian jalan, karena memang masyarakat membutuhkan itu. Karena itu yang bisa terlihat nyata.” Tutur pak sekdes.⁵⁹

Oleh sebab itu pentingnya komunikasi masyarakat dan pihak pemerintah desa dalam hal ini bertujuan lebih mengerti kondisi yang harus diutamakan dalam pembangunan di masyarakat. Namun, tujuan pihak pemerintah desa juga ingin semua masyarakat mengetahui jika Banjarbendo memiliki 3 dusun yang dimana nantinya dalam pembangunan ini harus merata dan sesuai skala prioritas tanpa membeda-bedakan dusun yang satu dengan dusun yang lainnya.

Jadi semua dalam forum musyawarah itu dapat menerima dan bermufkat bersama dalam hal pembangunan desa. Itulah cara aparat desa untuk memberikan sosialisasi terkait dana anggaran bantuan yang diberikan pemerintah kepada desa dalam perencanaan pembangunan desa. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat sangat berperan dalam penggunaan dana desa yang merupakan program pemerintah sehingga

⁵⁹ Hasil wawancara dengan informan Bapak Drs. Kusnadi pada tanggal 9 Juli 2020.

transparansi dana juga bisa diketahui oleh masyarakat.

3. Tahap Implementasi

a. Pendampingan Aparatur Desa Dalam Pembangunan

Gambar 4.3 pembangunan saluran air di Dusun dukuh Banjarnendo Desa Banjarnendo



Seperti contoh gambar pembangunan saluran air, melalui bapak khoiril hayat yang merupakan Kaur Perencanaan dan Pembangunan mengatakan “membangun saluran air itu tidak sembarangan, tidak asal membangun karena sesuai kebutuhan namun lebih dahulu melalui proses pelaporan seperti panjang saluran berapa, kedalaman berapa, pengurukannya dimana karena itu harus real dimana nantinya seperti SPP (Surat pembayaran ke bank), itu nantinya ditanya oleh pihak inspektorat mengenai rincianya. itu bertujuan untuk membuktikan realisasi pencairan

harus sesuai dengan pembangunan yang diajukan dilapangan”. Tutur pak kaur perencanaan.⁶⁰

Hal ini membutuhkan aparatur desa tidak bisa sembarangan menggunakan dana bantuan dari pemerintah dengan kemauanya sendiri karena harus sesuai dan ada partisipasi masyarakat didalamnya.

Jadi, cara aparatur desa setiap kali menerima program anggaran dana dari pemerintah setiap tahunnya, untuk perencanaan dan pembangunan, Langkah aparatur desa selalu menggunakan komuniaksi langsung dengan masyarakatnya dengan cara bermusyawarah mengadakan pertemuan di Balai desa. Kemudian untuk menyikapi dana desa, pemerintah desa sudah mengetahui pagu, dimana setiap tahunya akan mendapat giliran dusun mana yang akan menerima pagu dana yang lebih diprioritaskan. Kemudian memilah dan menyampaikan kepada RT/RW, BPD, dan LPMD untuk melakukan musyawarah Dusun terlebih dahulu sebelum di sampaikan kedalam forum musyawarah desa.

Setelah itu, dusun yang mendapat giliran pagu pembangunan menurut pak khoiril hayat sebagai informan mengatakan “Biasanya, pihak pemdes memberikan blanko isian kepada setiap RT untuk mengisi hal mana saja yang digunakan untuk pemberdayaan dan pembangunan di wilayah dusun masing-masing. Nanti yang lebih

⁶⁰ Hasil wawancara dengan informan Bapak khoiril Hayat pada tanggal 9 Juli 2020.

mebutuhkan yang mana, karena memakai skala prioritas. Setelah aspirasi masyarakat diwakili masing-masing RT yang sudah di tulis dalam blangko tadi kemudian diadakan musyawarah desa.”⁶¹

b. Pembangunan Desa Bersama Masyarakat

Gambar 4.4 Pembangunan Pavingisasi di Dusun banjarbendo Desa Sidoarjo



Pembangunan ini lebih mengutamakan kegiatan mendidik dan memberi motivasi kepada masyarakat agar menjadi lebih baik. Komunikasi pembangunan bertujuan untuk menanamkan gagasan-gagasan sikap netral, dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Tidak hanya membenahi saluran air untuk mencegah banjir dimusim hujan, pemerintah desa memaksimalkan dana yang diberikan pemerintah untuk membenahi segala kekurangan yang sudah

⁶¹ Hasil wawancara dengan informan Bapak khoirul Hayat pada tanggal 9 Juli 2020.

diusulkan oleh masyarakat. Seperti contoh pembangunan pavingisasi, yang bertujuan membenahi akses jalur yang ada didesa menjadi lebih baik. Semuanya terlaksana berkat proses komunikasi yang terjalin antara masyarakat dan juga pihak Appartur desa.

Gambar 4.5 Media Plakat sebagai bukti pelaksanaan pembangunan



Melalui kaur pembangunan dan perencanaan yaitu Bapak khoirul hayat menambahkan tidak hanya pembangunan saluran irigasi maupun memperbaiki jalan desa, pemerintah desa banjarbendo juga telah berhasil mewujudkan dalam pembangunan dan perencanaan gedung serbaguna yang bertujuan nantinya untuk seluruh kegiatan masyarakat. Seperti digunakan untuk olahraga badminton, futsal, hingga acara pernikahan dll bisa memakai fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah desa. Dengan ini

masyarakat saling lebih aktif untuk beraktivitas di dalam desa nya sendiri.

Gambar 4.6 Pembangunan Gedung Serbaguna Di Dusun Banajarpoh Desa Banjarbendo



Gedung serbaguna ini juga dapat dikelola oleh pemerintah desa untuk menambah pemasukan. Dengan cara menyewakan kepada pihak luar apabila ingin menggunakannya, peran organisasi karang taruna disini sangat bisa dimaksimalkan. Aparatur desa telah memberikan pelatihan kepada karang taruna agar bisa mengelolanya dan bisa menjadi aset desa yang harus dijaga. “Tapi yang jelas tujuan dibangunnya gedung serba guna ini adalah untuk kepentingan masyarakat desa Banjarbendo sendiri, agar dapat lebih bersosialisasi antar masyarakat terutama kegiatan sosial maupun rohani bisa lebih sering

aktif digelar di gedung serbaguna ini.”⁶² Tambah pak sekretaris desa.

Gambar 4.7 Realisasasi APBDes 2019

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SIDOARJO
DESA BANJARBENDO
Jl. Balai Desa No.1 Telp: (031) 8952474
SIDOARJO 61225

REALISASI APBDes 2019 DESA BANJARBENDO KEC. SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2019

PENDAPATAN			
RINCIAN	ANGGARAN APBDes	REALISASI PENDAPATAN	LEBIH/(KURANG)
Pendapatan Asli Desa	141.840.000,00	141.839.940,00	60,00
Pendapatan Transfer	1.674.296.487,25	1.674.296.488,00	0,75
Dana Desa	803.150.652,75	803.150.653,00	0,25
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	423.039.563,89	423.039.564,00	0,11
Alokasi Dana Desa	448.106.270,61	448.106.271,00	0,39
Pendapatan Lain-Lain	0,00	2.903.685,54	2.903.685,54
JUMLAH PENDAPATAN	1.816.136.487,25	1.819.040.113,54	2.903.626,29

BELANJA			
RINCIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	786.413.826,47	695.390.567,00	91.023.259,47
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	770.558.110,75	737.329.190,00	33.228.920,75
Bidang Pelayanan Masyarakat	168.200.000,00	157.226.000,00	10.974.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	139.810.400,00	109.936.000,00	29.874.400,00
JUMLAH BELANJA	1.864.982.337,22	1.699.881.757,00	165.100.580,22
SURPLUS/(DEFISIT)	(48.845.849,97)	119.158.356,54	(168.004.206,51)

PEMBIAYAAN RINCIAN		
Penerimaan Pembiayaan		
	48.845.850,42	48.845.850,42
PEMBIAYAAN NETTO	48.845.850,42	48.845.850,42
SILPASILPA TAHUN BERJALAN	0,45	168.004.206,96
		(168.004.206,51)

⁶² Hasil wawancara dengan informan Bapak Drs. Kusnadi pada tanggal 9 Juli 2020

Gambar 4.8 Realisasi APBDes 2020



Setelah semua pembangunan dan perencanaan berhasil dilakukan kini tugas kepala urusan keuangan yang harus bertanggung jawab memberikan laporan kepada inspektorat jika dana bantuan yang diberikan kepada desa telah dilakukan dengan sebenar benarnya. Bu wiwin sebagai kaur keuangan mengatakan “Seluruh pembangunan yang telah dilakukan semuanya tidak langsung sekejap bisa dilaksanakan, karena pencairan dari pemerintah itu bertahap. Oleh sebab itu, dari awal pertama

menerima dana APBN tahun 2014 hingga saat ini yang digunakan untuk pembangunan, setiap tahunnya selalu dibuat rancangan pembangunan apa saja yang harus diprioritaskan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Setelah semua selesai, kemudian barulah membuat rancangan pembangunan yang bisa menambah fasilitas desa yang belum ada. Ini semua juga harus dibuatkan laporan terlebih dahulu karena itu merupakan syarat wajib untuk mencairkan dana yang diberikan pemerintah agar jelas penggunaannya.”⁶³ Tutar bu wiwin selaku kaur keuangan.

C. Media Komunikasi aparat desa dalam pengelolaan pembangunan di desa Banjarenda

1. Musrenbang Desa

Musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) telah menjadi istilah populer dalam penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran di daerah dan desa, bersamaan dengan penertbitan undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam pasal 1 ayat (21) dinyatakan bahwa Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Sedangkan untuk musrenbang desa dinyatakan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 pasal 1 ayat (11) yang menyebutkan bahwa musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para

⁶³ Hasil wawancara dengan informan Ibu Wiwin Andayani pada tanggal 9 Juli 2020.

pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan 5 tahun dan 1 tahun.

Perencanaan dan penganggaran merupakan suatu kesatuan konsep dan proses yang tidak terpisahkan. Rencana pembangunan tidak dapat dijalankan tanpa anggaran atau sumber pembiayaannya. Di tingkat desa disusun dokumen anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Konsep 'musyawarah' menunjukkan bahwa forum musyawarah perencanaan desa bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah merupakan istilah yang sebenarnya sudah jelas berarti merupakan forum untuk merembukkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama.

Dalam UU Desa pasal 78 dan 79 mensyaratkan keharusan bagi pemerintah desa untuk melaksanakan perencanaan pembangunan desa dalam rangka menyusun visi bersama memabngun desa antara masyarakat dan pemerintahan desa. Oleh sebab itu musrenbang desa merupakan salah satu proses untuk dalam pengelolaan pembangunan desa.

Tujuan diadakan nya musrenbangdes itu untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa, kemudian pembentukan tim penyusun RPJM desa, dilanjutkan pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program, penyusunan rancangan RKP desa melalui musyawarah, penetapan dan dilanjutkan dengan pengajuan.

“Pentingnya musrengbangdes ini untuk proses dan komunikasinya bisa berjalan dari pihak aparaturnya dengan masyarakat. Tidak sertamerta pembangunan itu ada, karena apabila usulan kegiatan tidak dari bawah, ketika mengaplikasikan dilapangan akan mendapat teguran atau protes dari masyarakat, hal itu yang ingin dihindari oleh aparaturnya desa.”⁶⁴ Tutar sekretaris desa.

2. Pelibatan Tokoh Masyarakat

Partisipasi yang dilakukan masyarakat selalu diperankan secara dominan oleh tokoh masyarakat. Pengertian Tokoh Masyarakat sendiri diartikan juga dengan elit masyarakat dimana, ia bertindak mewakili masyarakat/mengatas namakannya. Tokoh masyarakat dapat dikategorikan atau dibagi kedalam, Tokoh masyarakat formal atau elit formal dan tokoh masyarakat informal atau elit informal. Elite menurut Lipset dan Solari (2001), dengan mengutip posisi di puncak struktur-struktur sosial terpenting yaitu dalam bidang ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran dan pekerjaanpekerjaan bebas.⁶⁵

Partisipasi tokoh masyarakat adalah keterlibatan masyarakat yang diperankan oleh elit non formal. Jadi

⁶⁴ Hasil wawancara dengan informan Bapak Drs. Kusnadi pada tanggal 9 Juli 2020

⁶⁵ Erich S. P. Manolang, *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa*, diakses 15 oktober 2020 dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/1533/1228>

berbicara partisipasi tokoh masyarakat berarti berbicara partisipasi masyarakat itu sendiri. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah peran serta semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

Pengelolaan Pembangunan di desa Banjarende berjalannya dengan lancar semua karena komunikasi yang dilakukan aparat desa dengan masyarakat. Dalam hal ini tokoh masyarakat menjadi sosok yang paling berperan dalam hal terlibatnya komunikasi .

“saya mengusulkan ketika itu melihat kondisi lingkungan warga yang rumahnya jauh dari masjid, dimana 1 Dusun hanya memiliki 1 masjid. sebaiknya di adakan perencanaan pembangunan musholla di setiap RT yang sekiranya jarak rumahnya jauh dari masjid”.⁶⁶
Ujar bapak Mujiono selaku Tokoh Agama.

Melihat dampak penting dan positif dari perencanaan partisipatif, dengan adanya partisipasi masyarakat yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat membangun rasa kepemilikan yang kuat di kalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan informan Bapak Drs. Mujiono pada tanggal 3 Januari 2021

“Segala fasilitas pembangunan yang ada di desa ini, semua terjadi berkat peran masyarakat dan aparat desa yang menjalin komunikasi secara baik. Warga terus memberikan masukan kepada pemerintah desa, mengenai hal untuk kemajuan desa kedepannya. Sekarang tinggal masyarakat yang memberi bukti kepada aparatur desa selaku pemegang pemerintahan desa jika masyarakat bisa menjaga segala fasilitas yang telah dibangun”.⁶⁷

3. Media massa berbentuk plakat

Setelah melakukan Musrenbangdes dan pelibatan Tokoh Agama maupun Tokoh Masyarakat, Aparat desa menggunakan media massa dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat untuk menunjukkan akan dilakukannya pemabangunan setelah mendapatkan hasil perencanaan pembangunan desa.

Gambar 4.7 Gambar plakat pembangunan drainase



⁶⁷ Hasil wawancara dengan informan Bapak Peru Sinambang pada tanggal 3 Januari 2021

D. Pembahasan Hasil Penelitian (Analisis Data)

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa. menurut Drs. Kusnadi selaku Sekretaris Desa Banajrbendo telah melakukan beberapa tahapan untuk mengkomunikasikan tentang dana bantuan yang diberikan pemerintah dalam pembangunan kepada msyarakat. Hal itu ditunjukkan pada hasil wawancara peneliti dengan beliau yang dalam menjawab pertanyaan peneliti, responden sering menggunakan bahasa campuran, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Indonesia.

Dari penjelasan informan diketahui bahwa proses awal pihak pemerintahan desa Banjarnego untuk mengkomunikasikan Perencanaan pengelolaan pembangunan dengan sosialisasi Musrenbangdes.

Masyarakat dikumpulkan di balai desa untuk menerima informasi bahwa desa telah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah dan akan diwujudkan dalam Program pembangunan Desa. dari Musrenbang tersebut akhirnya dibentuk TPK (Team Pelaksana Kegiatan) yang terdiri dari anggota masyarakat itu sendiri. Selain memberikan informasi secara langsung, pemerintah desa juga menginformasikan Program pembangunan tersebut melalui media massa berupa plakat yang dipasang ditempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat dan melalui sosial media, yaitu melalui pesan whatsapp grup perwakilan tokoh Masyarakat atau tokoh agama yang bisa langsung menyebarkan informasi dari pemerintah desa.

Dari penjelasan itu, diperoleh gambaran tentang apa yang disampaikan oleh Everet M. Rogers (1985) mengenai difusi yang merupakan suatu proses menyampaikan atau pengkomunikasian suatu program inovasi kepada anggota dalam satu sistem sosial sudah mulai dilaksanakan. Dari hasil wawancara diketahui bahwa setelah masyarakat dikumpulkan dan diberi informasi, masyarakat akan melakukan musyawarah di masing- masing dusun untuk menentukan usulan apa yang akan diangkat dari masing – masing dusun yang disebut Musdus (Musyawaran Dusun). Musdus menampung usulan dari masing- masing RT/RW, yang kemudian disepakati jenis kegiatan mana yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan skala prioritas. Kesepakatan tersebut kemudian dibawa ke Musrenbangdes.

1. Komunikasi yang Digunakan dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan

Komunikasi yang digunakan dalam proses pengelolaan pembangunan di desa sebaiknya bersifat interaktif dan partisipatif. Hal ini diperkuat oleh pernyataan FAO (FAO, 1975 dalam Asngari, 2001) bahwa penggalangan partisipasi dilandasi adanya pengertian bersama, dan adanya pengertian tersebut adalah karena di antara orang-orang tersebut saling berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya. Dalam menggalang peran serta semua pihak diperlukan: terciptanya suasana yang bebas atau demokratis dan terbina kebersamaan. Suasana yang bebas akan memperlancar komunikasi semua pihak. Dengan adanya komunikasi yang komunikatif dan intim, akan terjalin suasana saling asah, saling asuh, dan saling asih, sehingga tergeraklah masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pembaruan.

Richard L. Wiseman memberikan definisi komunikasi sebagai proses yang melibatkan pertukaran pesan dan penciptaan makna.⁶⁸ Definisi ini memberikan pengertian bahwa komunikasi efektif apabila orang tersebut menafsirkan pesan yang sama seperti apa yang disampaikan oleh komunikator.

Pembangunan sering dipandang sebagai cara untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di masyarakat, terutama negara-negara berkembang. Saat ini, peran komunikasi dianggap sangat penting,

⁶⁸ Richard L. Wiseman, *Intercultural Communication Theory*, (California State University, Fullerton, 1995), h.15

terutama dalam pembangunan. Komunikasi dan pengembangan adalah dua hal yang saling terkait satu dengan yang lain. Memposisikan komunikasi dalam konteks pembangunan adalah bagian penting dari pengembangan dan komunikasi sebagai satu set variabel instrumental untuk pembangunan.⁶⁹

Menurut Zulkarimein Nasution, komunikasi pembangunan dapat dilihat dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik) diantara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara pemerintah dengan masyarakat.

Dalam proses komunikasinya, partisipasi masyarakat desa sangat diutamakan dalam hal pembangunan dan perencanaan desa. Pemerintah desa setempat menjalankan arahan dari pemerintah agar masyarakat diikuti sertakan dalam program pembangunan yang di targetkan oleh pemerintah pusat melalui dana bantuan desa (APBN).

Aparatur desa dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat dengan cara komunikasi secara langsung dan dilakukan dengan musyawarah seperti mengadakan musyawarah dusun, musyawarah desa, hingga menyediakan blanko kosong yang bertujuan setiap RT memberikan saran perencanaan atau pembangunan apa yang seharusnya di lakukan di desa Banjarebendo.

⁶⁹ Nasution, Z. 2004. Komunikasi Pembangunan. Pengenalan Teori dan Penerapannya. Jakarta : Rajawali Pers

Dengan cara tersebut membuat pekerjaan aparatur desa lebih terbantu karena masyarakat sendiri yang berpartisipasi didalamnya, sehingga mengetahui hal apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, yang kemudian pemerintah desa tinggal melanjutkan pembuatan rancangannya.

2. Peran aparatur desa dalam melakukan pendekatan masyarakat

Dalam kedudukannya, pemerintah memegang peranan strategis. Peranan strategis ini berhubungan dengan penyelenggaraan pembangunan yang disebut juga peranan strategis administratif. Peranan pemerintah melalui kemampuan administratifnya dapat melakukan berbagai hal mewujudkan pembangunan pedesaan. Perincian dan pelaksanaan peranan dasar disebut sebagai peranan administratif, yaitu pola perilaku yang diharapkan atau yang telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan.⁷⁰

Program pembangunan di Desa Banjarnego merupakan langkah mengupayakan kesejahteraan hidup masyarakat melalui program yang terencana dan terealisasi dengan baik, akan tetapi dibutuhkan kerja sama yang baik antara pihak pemerintah dengan masyarakat demi terciptanya pembangunan desa.

Dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan fasilitas pembangunan dibutuhkan eksistensi dari

⁷⁰ Ndraha, Taliziduhu. 1990. Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: Rineka Cipta.

pemerintah untuk menemukan masalah dan jalan keluar bagi masyarakat. Pemerintah harus melakukan pendekatan partisipatif yang bertujuan untuk mengajak dan member sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebutuhan pembangunan yang harus di laksanakan di desa Banjarbendo.

Pelaksanaan pembangunan akan berhasil setelah masyarakat turut berpartisipasi didalamnya. Aparat desa melakukan berbagai cara untuk menjalankan proses komunikasi pembangunan dengan cara penyusunan pembangunan hingga nantinya disampaikan melalui musyawarah desa dalam hal perencanaan pembangunan desa.

Aparatur desa juga sangat membutuhkan informasi dari tokoh masyarakat dalam proses komunikasi, karena tokoh masyarakat lebih mengetahui hal apa yang di butuhkan oleh masyarakat secara langsung. Dengan ini aparatur desa bisa meminta bantuan kepada tokoh masyarakat maupun tokoh Agama untuk menyampaikan sosialisasi akan diadakan nya pembangunan yang ada di desa. Hal itu yang nantinya memudahkan pemerintah desa menegathui perencanaan apa yang harus dilakukan dalam hal pembangunan setelah mendapat informasi dari tokoh masyarakat didalam Musrenbangdes. Hal ini telah terealisasi dengan sudah dibangunnya seperti fasilitas musholla, gedung serbaguna, jaringan listrik, hingga saluran air yang baik.

Perencanaan bersama ini memadukan antara kebijakan yang bersifat top-down dan bottom-up sehingga masyarakat pedesaan dapat dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.

Keterlibatan tersebut telah memberikan keuntungan bagi masyarakat desa Banjarnego.

Perspektif Teori :

Dalam menjalankan proses komunikasi mengenai pengelolaan pembangunan yang melibatkan masyarakat didalamnya, aparaturnego desa Banjarnego melakukan proses komunikasi melalui komunikasi secara langsung dengan masyarakat desa yang dilakukan secara intensif.

Berdasarkan hasil temuan dan fakta yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengkonfirmasi temuan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah hasil temuan dalam penelitian ini:

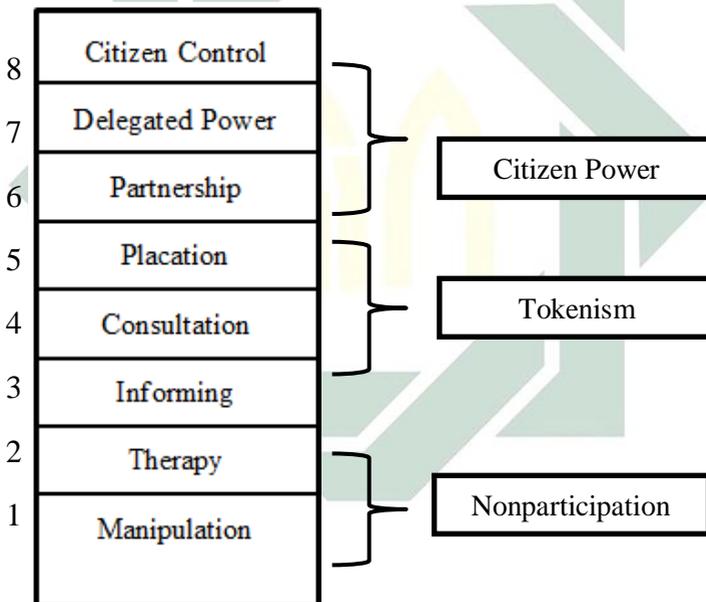
- Aparaturnego desa dan masyarakat desa Banjarnego telah melakukan *Citizen Control* dimana masyarakat dapat berpartisipasi didalam mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Dilihat dari perencanaan dan pembangunan yang dilakukan di desa Banjarnego sepenuhnya dilakukan atas dasar partipasi dari masyarakat desa.
- Aparaturnego desa sepakat jika masyarakat memiliki *Delegated Power* sehingga masyarakat memiliki kewenangan dalam memberikan saran kepada pemerintah desa dalam hal pembangunan tanpa ada tekanan dari pihak pemerintah maupun dari pihak luar.
- Aparaturnego desa dan masyarakat menjadi *partnership*, dimana masyarakat memiliki hak untuk berunding dan bermusyawarah dengan aparaturnego desa dalam mengambil keputusan dan

kesepakatan untuk saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan.

- Aparatur desa telah melakukan *Placation*, dimana aparat desa tetap menjadi pemegang kekuasaan (pemerintah) dan menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat untuk menjadi anggota suatu badan public, seperti aparat desa dalam melakukan komunikasi tidak harus melakukan komunikasi dengan semua individu masyarakat. Namun dengan cara mengumpulkan ketua RT/RW, tokoh masyarakat, BPD, dan LPMD sudah cukup mewakili pesan dari masyarakat kepada pemerintah desa.
- Aparatur desa telah melakukan tingkat partisipasi masyarakat dengan berdasarkan kekuasaan mengenai *Consulation*, dimana masyarakat tidak hanya diberi tahu tentang program pemerintah memberi bantuan dana desa untuk pembangunan, tetapi masyarakat juga diundang berbagi pendapat dalam musyawarah dusun atau musyawarah desa. Masyarakat dan aparat desa saling bercerita tentang persoalan yang terjadi di Desa, saran dan kritik ditampung oleh aparat desa tetapi keputusan tetap ada ditangan aparat desa.
- Aparatur desa telah melakukan *Informing*, dimana aparat desa memberikan informasi kepada masyarakat terkait anggaran dana bantuan pemerintah sejumlah sekian dan terkait proposal kegiatan. Hal ini membuat masyarakat dapat memberikan saran yang sepadan mengenai pemabngunan dengan dana yang diterima oleh pemerintah desa.

Jenjang partisipasi masyarakat dapat direncanakan sesuai dengan konteks dan kebutuhan tertentu. Definisi dari “partisipasi” masyarakat adalah sebuah bentuk pemaknaan tentang praktek yang baik.⁷¹ Individu atau kelompok dapat di ikut sertakan untuk membangun partisipasi mereka sendiri. Jenjang partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa kata “partisipasi” dapat digunakan untuk aktivitas dan hubungan yang berbeda.

Tiga kelompok partisipasi



Dua tangga terbawah dikategorikan sebagai “non partisipasi” dengan menempatkan bentuk-bentuk partisipasi yang dinamakan terapi dan manipulasi.

⁷¹ Robert chambers, *Ideas For Development*, (London: Earthscan, 2005), Hal. 106.

Sasaran dari kedua bentuk ini adalah mendidik dan mengobati masyarakat yang berpartisipasi. Tangga ketiga, keempat, dan kelima sebagai tingkat Tekonism yaitu tingkat partisipasi dimana masyarakat didengar dan diijinkan berpendapat, tetapi mereka tidak boleh memiliki kemampuan untuk mendapat jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegeang keputusan.

Selanjutnya, Arnstein mengkategorikan tiga tangga teratas kedalam tingkat kekuasaan masyarakat (citizen power). Masyarakat dalam dalam tingkatan ini memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dengan menjalankan kemitraan (partnership) dengan memiliki kemampuan tawar menawar bersama-sama pengusaha atau pada tingkatatingkatan yang lebih atau tingkatan yang lebih tinggi pendelegasian kekuasaan (delegated power) dan pengawasan masyarakat (citizen control). Pada tingkat ke 7 dan 8, masyarakat (non elite) memiliki mayoritas suara dalam proses pengambilan keputusan bahkan sangat mungkin memiliki kewenangan dalam mengelola suatu objek kebijakan tertentu.

Dari tiga kelompok partisipasi yang sudah dijelaskan dalam teori partisipasi diatas, Komunikasi Aparatur desa dan Masyarakat dalam pengelolaan pembangunan desa BanjARBendo, terlihat partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk membantu berjalanya program tersebut. Sehingga, Kelompok partisipasi yang cocok digunakan untuk aparat desa dan masyarakat desa BanjARBendo adalah Citizen Power dan Tokenism.

1. Perspektif Islam

Umat islam yang mayoritas penduduk Indonesia mendambakan tampilnya kepemimpinan Islam setiap kehidupan bernegara dan bermasyarakat, mulai dari tingkat nasional sampai tingkat terendah yaitu kepala desa, yang diharapkan mampu mengelola sistem pemerintahannya berdasarkan dengan prinsip dasar politik islam.

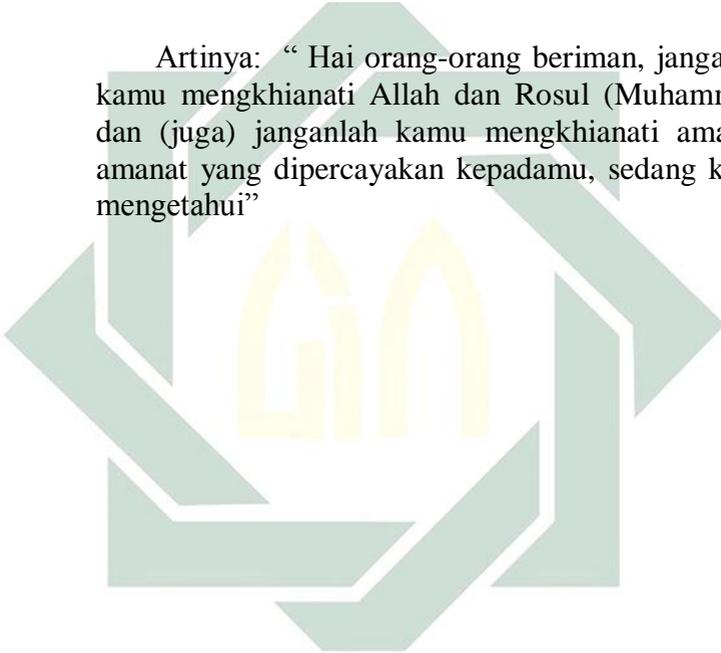
Dalam islam kepemimpinan merupakan amanah kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga dipertanggung jawab kan dihadapan Allah SWT, maka dari ini seorang pemimpin harus bersifat amanah (dapat dipercaya). Jika pemimpin tidak mempunyai sifat amanah, tentu yang terjadi adalah penyalagunaan jabatan dan wewenang untuk hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu pemerintahan desa yang didalam nya termasuk apparatur desa, sangat diharapkan agar menjadi wakil masyarakat dalam menjamin kesejahteraan dalam tata kelola desa yang diharapkan.

Dengan berjalanya komunikasi yang baik antara aparatur desa dan masyarakat, membuat masyarakat mengetahui jika pemimpin mereka saat ini benar-benar mengayomi warganya dan yang paling penting yaitu bertanggung jawab atas tugasnya. Karena masyarakat telah mempercayai mereka dan memilih mereka untuk menjalankan sistem pemerintahan yang ada didesa. Hal ini membuat kondisi desa menjadi sejahtera karena pemimpin dan rakyat nya hidup berdampingan dan saling mendukung satu sama lain.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal Ayat 27:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ
وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “ Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rosul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh saat dilapangan serta dikonfirmasi kedalam teori, peneliti dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini.

1. Komunikasi Partisipatif adalah pola komunikasi yang digunakan aparat desa dalam mengelola pembangunan di Desa Banjarbendo.
2. Musrenbangdes yang melibatkan tokoh agama dan tokoh Masyarakat adalah media komunikasi yang digunakan aparat desa dalam mengelola pembangunan d Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo.

B. Rekomendasi

Berdasarkan dari hasil penelitian, peneliti memiliki rekomendasi yang ingin disampaikan:

1. Sebaiknya pemerintah desa (Aparatur Desa) dapat lebih aktif lagi dalam melakukan sosialisasi tentang hal-hal yang menyangkut pembangunan desa seperti kondisi, perkembangan, serta manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat bila sistem pembangunan di desa berjalan dengan baik dan mengalami tingkat kemajuan dalam bidang pembangunan.
2. Bagi para masyarakat di Desa Banjarbendo yang memiliki pengetahuan dalam bidang pembangunan sebaiknya lebih aktif dan berinisiatif dalam berpartisipasi sehingga dapat

menjadi motifator bagi seluruh masyarakat di Banjarnendo kecamatan Sidoarjo.

3. Bagi peneliti selanjutnya, di harapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi referensi yang berkaitan dengan peran-peran komunikasi pemerintah desa guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu:

1. Waktu penelitian ini sedikit terhambat dikarenakan adanya wabah yang saat ini melanda dunia terutama di Indonesia yaitu virus corona, dimana semua kehidupan normal seketika berubah dengan era new normal yang harus lebih mengutamakan kepentingan kesehatan. Maka peneliti sedikit terhambat dalam melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)

Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. (Bandung: Remaja Rostda Karya, 1999)

Vardiansyah, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004)

Rismi Somad dan Donn Juni Priansa, *Manajemen Komunikasi (Membangun Bisnis Berorientasi pelanggan)*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

Moeljarto T., *Politik pembangunan (Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi)*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1995)

Andrik Purwasito, *Komunikasi Multikultural* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002)

Syahyuti, *30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*. (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2006)

Kasiyanto, *Masalah dan Strategi Pembangunan Indonesia*. (Jakarta: PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, 1991)

Pius a. Partan dan M.Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. (Surabaya: Arkola, 2006)

Y.Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta: Sebelas Maret Univeristy Press, 1994)

Robert Chambers, *"Ideas for Development"* (London: Earthscan, 2005)

Hessel Nogi S Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005)

Haidari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yohyakarta: Gajah Mada University Press, 1993)

Zakaria, *"Konsep Ajaran Islam tentang kepemimpinan"*. (Majalah Al-adalah, No 20-21 Juli-desember, 1998)

Dr. Ajat Rukajat, M.MPd, *"Pendekatan Penelitian Kualitatif"*, (cv budi utama, Yogyakarta 2018)

Sugiyono, *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009)

Deddy Mulyana. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)

Jurnal:

Dr. Dra. Erliana Hasan, M.Si., *Pradigma Komunikasi Pemerintahan* diakses pada 21 Mei 2020 dari <http://repository.ut.ac.id/4232/1/IPEM4319-M1>

Arimbi Heroeputri, Mas Achmad Santoso, "Peran Serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan" (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia- WALHI, Jakarta 1993)

Sigit Wijaksono, *"Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pemukiman"*, Jurnal ComTech Vol.4 No.1 Juni 2013.

Erich S. P. Manolang, *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa*, diakses 15 oktober 2020 dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/1533/1228>

Web:

Diakses pada 1 oktober 2019 dari <http://www.keuandangesa.com>

Diakses pada 15 Mei 2020 dari

https://www.academia.edu/23958133/teori_partisipasi_masyarakat_menurut_para_ahli

diakses pada 21 Mei 2020 dari <https://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI online), diakses pada tanggal 28 Mei 2020 dari <https://kbbi.web.id/desa>

5 Struktur Pemerintahan Desa Beserta Tugas dan Fungsinya, diakses pada tanggal 28 Mei 2020 dari <http://www.berdesa.com/5-struktur-pemerintahan-desa-beserta-tugas-dan-fungsinya/>

Informan:

Drs. Kusnadi (Sekretaris Desa Banharbendo)

Khoirul Hayat (Kaur Perencanaan dan pembangunan)

Wiwin Andayani (Kaur Keuangan)

Mujiono (Tokoh Agama)

Peru Sinambang P. (Tokoh Masyarakat)